

**ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI
TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN
PENDIDIKAN PEREMPUAN TERHADAP
KEMISKINAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

PRISKILA MELLINA PANGGABEAN
NIM. 12020118140181

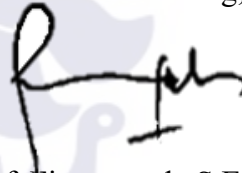
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Priskila Mellina Panggabean
Nomor Induk Mahasiswa : 12020118140181
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI TENAGA
KERJA PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN
PEREMPUAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Prof. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D.

Semarang, 30 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Prof. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP. 197404271999031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Priskila Mellina Panggabean
Nomor Induk Mahasiswa : 12020118140181
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI TENAGA
KERJA PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN
PEREMPUAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Prof. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Juni 2025

Tim Penguji

1. Firmansyah S.E., M.Si., Ph.D.

(.....)

2. Prof. Akhmad Syakir Kurnia S.E., M.Si., Ph.D.

(.....)

3. Aris Anwaril Muttaqin, Lc., M.S.I., Ph.D.

(.....)

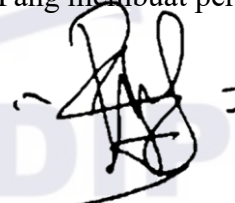
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Priskila Mellina Panggabean, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan /atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Priskila Mellina Panggabean

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dan Pendidikan Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia". Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menjadi sumber inspirasi terbaik.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terus merajalela dan harus mendapatkan perhatian khusus. Partisipasi tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan dan tingkat pendidikan perempuan menjadi salah satu aspek yang menarik dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh partisipasi tenaga kerja dan pendidikan perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan terbaik kepada :

1. Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Dr. Jaka Aminata, S.E., M.A., selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

5. Kedua orang tua penulis, Jeremias Panggabean dan Fridawati Sinaga, yang selalu memberikan doa, nasihat, dan dorongan, serta kesabaran luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat membanggakan.
6. Adik-adik penulis, Jefry Stephen Panggabean dan Priscil Marcella Panggabean, terima kasih atas doa dan segala dukungan.
7. Teman-teman yang berjuang bersama, Gita, Aulia, Maulidia, dan Dina. Terima kasih atas diskusi, saran, dan kerja samanya.
8. Almh. Monica Azzahra, terima kasih karena menjadi teman yang baik dalam waktu yang singkat, kebaikanmu tidak akan pernah terlupakan.
9. Keluarga besar Panggabean dan Sinaga, yang tiada hentinya mendoakan dan mengharapkan yang terbaik.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah tulus memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jakarta, Juni 2025

Penulis,



Priskila Mellina Panggabean

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Pertanyaan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	14
2.1.1 Kemiskinan	14
2.1.2 Pendidikan Perempuan	28
2.1.3 Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan	32
2.2 Hubungan Antar Variabel	34
2.2.1 Hubungan Pendidikan Terhadap Kemiskinan	34
2.2.2 Hubungan Partisipasi Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan	36
2.3 Penelitian Terdahulu	38
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis	48
2.5 Hipotesis Penelitian	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	50
3.1.1 Kemiskinan	50
3.1.2 Pendidikan	50
3.1.3 Partisipasi Tenaga Kerja	51
3.2 Jenis Data	51
3.3 Metode Pengumpulan Data	51
3.4 Metode Analisis	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum	53
4.1.1 Kondisi Kemiskinan di Indonesia	53
4.1.2 Kondisi Tingkat Pendidikan Perempuan di Indonesia	57

4.1.3 Kondisi Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia	58
4.2 Analisis Data	60
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Pengaruh Pendidikan Perempuan terhadap Kemiskinan	62
4.3.2 Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan terhadap Kemiskinan	62
4.3.3 Pengaruh Simultan dan Kompleksitas Faktor Sosial	63
4.4 Kebijakan Publik Terkait Upaya Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan	64
4.5 Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan	64
4.6 Kebijakan Publik di Bidang Ketenagakerjaan	70
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Keterbatasan Penelitian	73
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dan metode regresi linier berganda, penelitian ini menggunakan data sekunder terkait pendidikan perempuan, partisipasi kerja perempuan, dan tingkat kemiskinan. Model yang dibangun telah memenuhi uji asumsi klasik, sehingga layak dianalisis secara statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, secara parsial, hanya pendidikan perempuan yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan partisipasi tenaga kerja perempuan tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan perempuan memiliki peran dominan dalam menurunkan kemiskinan.

Penelitian merekomendasikan penguatan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi perempuan, pengembangan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri, serta kebijakan ketenagakerjaan yang ramah perempuan. Selain itu, promosi kewirausahaan perempuan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan perempuan perlu ditingkatkan sebagai strategi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pendidikan Perempuan, Partisipasi Kerja Perempuan, Pemberdayaan, Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of women's education levels and female labor force participation on poverty rates in Indonesia. Using a quantitative descriptive approach and multiple linear regression analysis, the research relies on secondary data related to women's education, female labor participation, and poverty levels. The constructed model has passed the classical assumption tests, making it statistically feasible for further analysis. The findings reveal that, simultaneously, women's education and labor force participation have a significant effect on poverty levels. However, partially, only women's education shows a negative and significant influence, while female labor force participation does not have a statistically significant effect. These results indicate that women's education plays a dominant role in reducing poverty. The study recommends strengthening inclusive and quality educational access for women, developing job training aligned with industry needs, and implementing women-friendly labor policies. Additionally, promoting women's entrepreneurship and increasing public awareness of the importance of women's education are essential as long-term strategies for sustainable poverty reduction.

Keywords: Poverty, Women's Education, Female Labor Participation, Empowerment, Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Astuti, 2018). Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya; Meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, dalam tataran ekonomi makro pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal.

Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat. Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha,

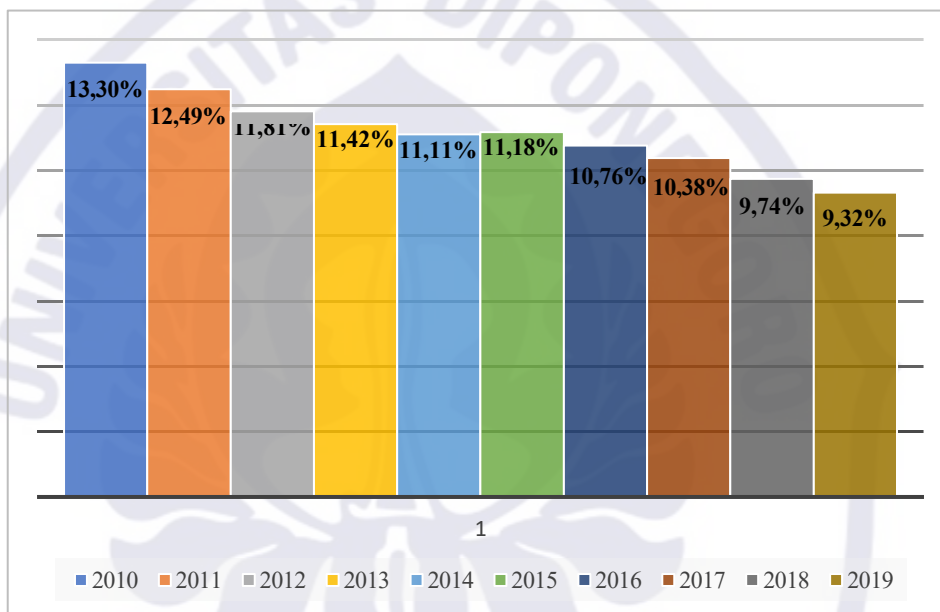
serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, keberantaraan. Melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan.

Selain itu, penguatan perekonomian *inspired middle income class* diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian. Melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi. Meningkatkan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. Serta melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor.

Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Selain itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antarwilayah dan antarpulau, mengefektifkan TPID, serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain. Investor domestik dan wirausaha lokal juga didorong untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Pemerintah mengurangi tekanan impor melalui penerapan kewajiban penyedia lapak online menjual barang lokal dengan komposisi minimal tertentu serta kemudahan investasi sektor industri untuk menyediakan bahan baku yang

selama ini diimpor, Namun dalam sepuluh tahun terakhir persentase penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan. Walaupun berbagai upaya dan dana telah dikeluarkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2019



Sumber : BPS (2019)

Kemiskinan adalah fenomena multidimensional karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

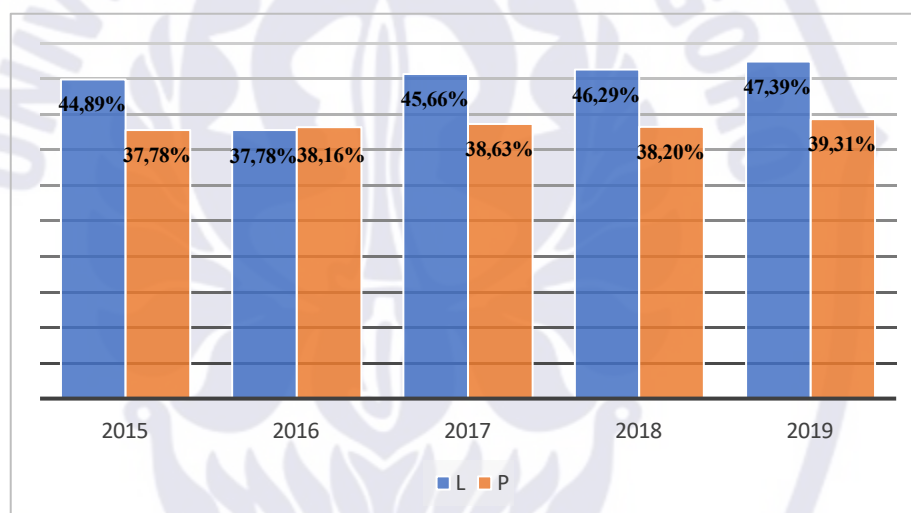
Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat dibuat dengan membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan juga tepat sasaran.

Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menerapkan program tepat sasaran. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat (Giovanni, 2018). Perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan laki-laki dan perempuan dalam karakteristik kemiskinan yang sama lebih menderita dibanding laki-laki. Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank, diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; pendidikan, partisipasi tenaga kerja, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur. Indonesia memiliki jumlah penduduk perempuan yang cukup besar.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah partisipasi tenaga kerja. Partisipasi tenaga kerja merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai untuk melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi tenaga kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja. Tenaga kerja merupakan modal bagi gerak roda pembangunan. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan angka tingkat partisipasi tenaga kerja, sebab ketenagakerjaan dapat menjadi sumber masalah kemiskinan. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang berstatus tidak bekerja lebih banyak, maka akan berimplikasi pada peningkatan jumlah

penduduk miskin dan sebaliknya jika tingkat partisipasi tenaga kerja meningkat maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih rendah. Bahkan selisih rasio tenaga kerja laki-laki dan perempuan cukup besar dengan peningkatan selama lima tahun terakhir yang tidak signifikan tercermin dalam persentase tenaga kerja formal berikut.

Tabel 2. Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2015-2019

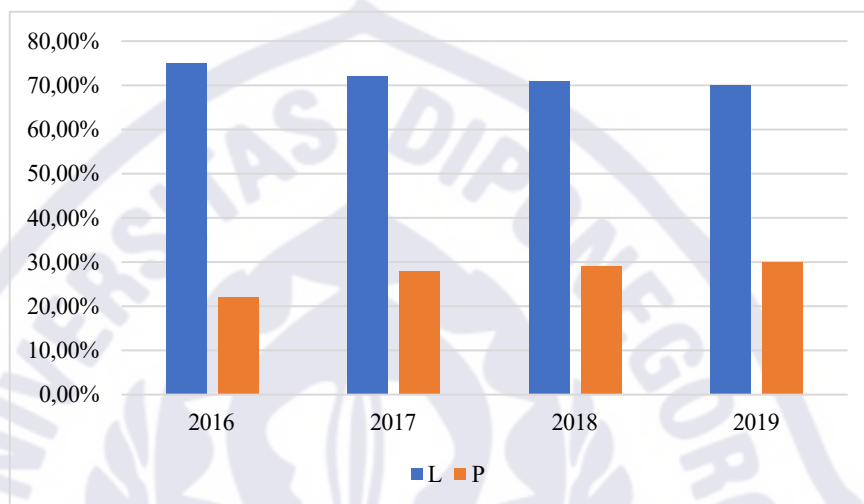


Sumber : BPS (2019)

Bahkan dalam posisi yang lebih tinggi seperti manajer, perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Terlihat dalam grafik berikut.

FEB UNDIP

Tabel 3. Distribusi Jabatan Manajer Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2016-2019



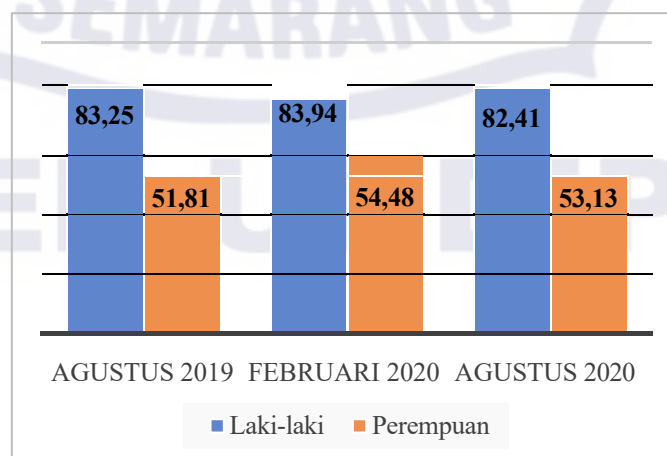
Sumber : BPS (2019)

Berdasarkan penelitian sebelumnya beberapa faktor yang menyebabkan perempuan mengurungkan niatnya untuk berpartisipasi dalam tenaga kerja adalah perkawinan. Perempuan tidak perlu lagi masuk pasar kerja karena tingginya upah yang diterima oleh laki-laki sebagai kepala keluarga dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemungkinan lain adalah diduga karena seiring meningkatnya pendidikan kaum perempuan terjadi pergeseran nilai di tengah masyarakat terkait peran perempuan. Mereka mulai menyadari bahwa anak-anak mereka membutuhkan peran ibu yang sangat besar di usia keemasan (sekitar 0-8 tahun), karena pada masa tersebut anak akan mengalami tingkat perkembangan yang sangat drastis seperti perkembangan kognitif, emosi, motorik, fisik dan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kualitas hidup anak di masa depan. Didunia kerja pun perempuan masih menemui hambatan untuk masuk ke pasar kerja dibanding dengan laki-laki. Sistem budaya yang terbentuk dalam masyarakat mempengaruhi cara pandang dan kedudukan perempuan sebagai tenaga kerja. Masih banyak ditemui perusahaan yang memilih untuk tidak mempekerjakan

tenaga kerja perempuan dikarenakan enggan membayar upah saat tenaga kerja perempuan tersebut cuti hamil dan melahirkan.

Dalam hal tunjangan, perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak sering diperlakukan sebagai pekerja lajang sehingga tidak berhak memperoleh tunjangan keluarga. Tidak jarang pula terjadi pemutusan hubungan kerja bagi perempuan yang disebabkan karena perempuan tersebut sedang dalam kondisi hamil. Kesempatan untuk berkembang dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, konferensi, seminar-seminar lebih terbuka kepada laki-laki karena alasan domestik yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk melakukan perjalanan dinas. Kondisi inilah yang kemudian menghambat masuknya perempuan masuk ke pasar kerja. Berdasarkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat partisipasi tenaga kerja laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Kondisi ini selalu sama baik pada Agustus 2019, Februari 2020, maupun Agustus 2020 ketika tingkat partisipasi tenaga kerja laki-laki lebih tinggi sekitar 1,5 kali tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Sebagai gambaran, tingkat partisipasi tenaga kerja laki-laki pada Agustus 2020 mencapai 82,41 persen, sedangkan pada perempuan hanya sebesar 53,13 persen.

Tabel 4. Tingkat TPAK di Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020



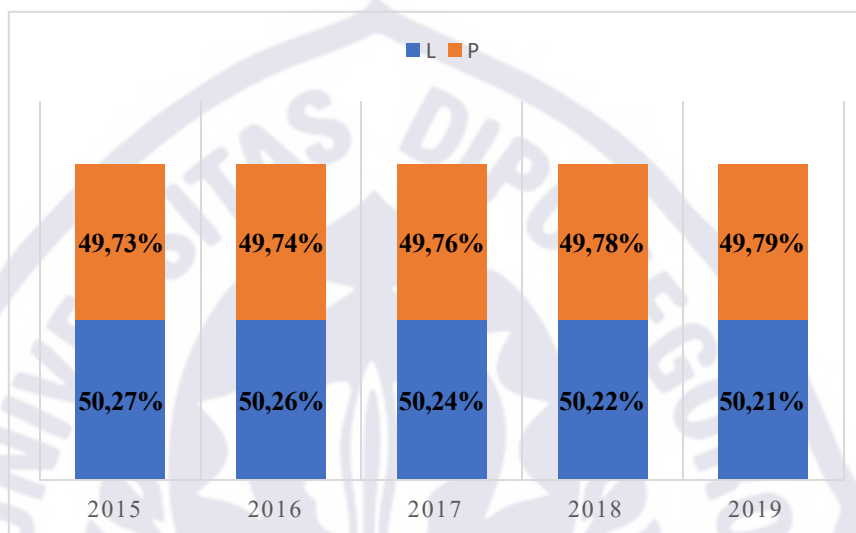
Sumber : BPS (2020)

Di samping itu perempuan juga masih sering terjadi diskriminasi gender pada ruang dan upah kerja. Terlebih lagi hal tersebut terjadi jika berasal dari kelompok minoritas, dalam penelitiannya Settles, dkk menemukan adanya diskriminasi pada perempuan kulit hitam yang mempengaruhi psikis dari perempuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil penemuan Settles, dkk yang mengatakan jika perempuan kulit hitam memiliki intensitas kepuasan kerja lebih minim daripada perempuan kulit putih. Penurunan kepuasan kerja tersebut, dilatarbelakangi oleh diskriminasi yang secara tidak langsung memicu tekanan dalam bekerja. Perempuan juga masih mendapat tekanan yang beranggapan bahwa kurangnya tingkat produktivitas daripada laki-laki, sekalipun ia dapat menyangkalnya dengan kinerja yang dia berikan.

Sehingga lambat laun akan menyebabkan pemudaran pada tingkat kepercayaan dirinya untuk melakukan berbagai tindakan. Padahal sebetulnya, perempuan berpengaruh besar pada setiap proses kehidupan. Jika melihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan memiliki selisih rasio antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki sangat tipis. Seharusnya baik laki-laki dan perempuan saat ini memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berpartisipasi pada pasar tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja wanita yang relatif banyak merupakan aset yang dapat digunakan sebagai pendorong pembangunan perekonomian nasional melalui partisipasinya untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk perempuan yang kuantitasnya besar.

Jika dapat memanfaatkan tenaga kerja tersebut, partisipasi tenaga kerja wanita sebagai salah satu potensi dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan ekonomi keluarga sangat dibutuhkan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019



Sumber : Publikasi BPS (2019)

Sementara itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut Todaro (2003) pendidikan dapat membentuk kemampuan intelegensi masyarakat yang akan mempengaruhi suatu negara yang sedang berkembang, untuk mengendalikan suatu teknologi baru, diperbarui serta membangun kapabilitas produksi supaya timbul tercapainya pengembangan yang terjadi secara terus menerus. Sedangkan menurut Becker (1975) pendidikan merupakan aset modal manusia yang sangat berarti. Pendidikan ini dapat diartikan sebagai investasi yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan suatu negara. Menurut Sumarsono (2009) pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbanyak keterampilan, pengetahuan dan perilaku serta membentuk integritas pendidikan setiap individu. Kemiskinan terjadi karena masyarakat berpendidikan rendah sehingga membuat pengangguran semakin bertambah banyak, ketika faktor-faktor tersebut akan saling mempengaruhi dan adanya

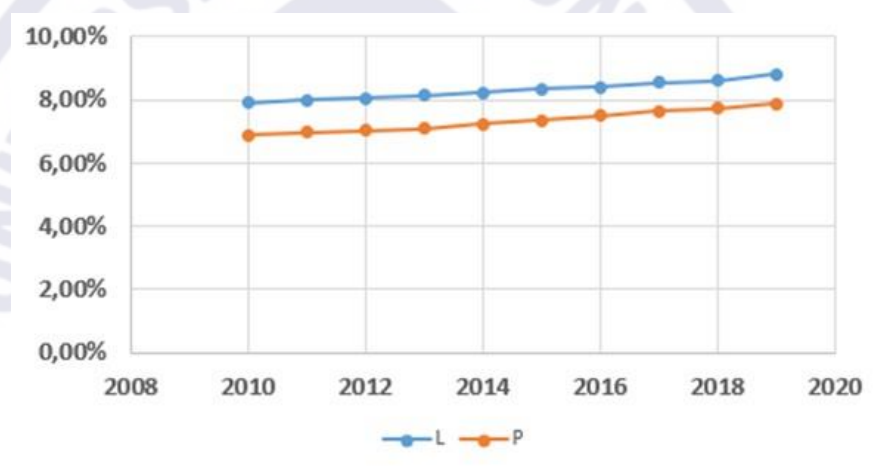
keterkaitan. Tingkat pendidikan merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam penurunan kemiskinan.

Hermanto S. dan Dwi W. (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut relatif tidak terlalu besar. Populasi penduduk juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruhnya relatif kecil. Sedangkan pendidikan mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengaruhnya paling besar. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memang merupakan pionir dalam pembangunan. Pendidikan diakui secara luas bahwa memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Bloom dkk., 2006). Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di Negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang.

Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2010). Pendidikan masih dipandang sebagai privilese bagi sebagian kaum perempuan. Faktor ekonomi, interpretasi agama, konsepsi peran gender yang mengakar dalam budaya, serta mitos-mitos lainnya menjadi penyebab hal tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor ketertinggalan perempuan untuk merasakan pendidikan. Seperti yang kita ketahui pemerintah telah mengeluarkan berbagai program agar semua

penduduk baik laki-laki maupun perempuan dapat mendapatkan kesempatan yang sama di dunia pendidikan dengan harapan dapat berpartisipasi dalam tenaga kerja dengan pendapatan yang layak dan berkontribusi pada perekonomian. Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, berikut ini:

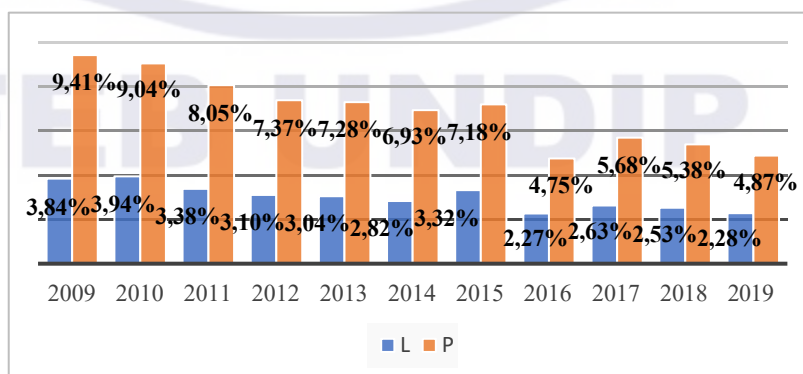
Tabel 6. Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2008-2020



Sumber : BPS (2019)

Salah satu bukti keberhasilan program pendidikan pemerintah adalah menurunnya angka tidak/ belum pernah sekolah terutama pada perempuan yang memiliki tren penurunan yang tajam seperti pada grafik berikut:

Tabel 7. Jumlah Tidak / Belum Pernah Sekolah di Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2019



Sumber : BPS (2019)

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang pesat dalam mengurangi ketimpangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan semakin mengecilnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian tingkat pendidikan. Namun, peningkatan pendidikan tidak sejalan dengan partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan utamanya sektor formal.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 2016, saat ini rata-rata perempuan hanya mendapat pendidikan sampai kelas dua sekolah menengah pertama (SMP). Dengan kata lain, rata-rata lama perempuan bersekolah hanya selama 7,5 tahun. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 menunjukkan, angka melek huruf pada perempuan lebih rendah dari laki-laki dengan berada di angka 94,33 persen dan laki-laki 97,48 persen. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat akses bekerja bagi perempuan terbatas. Dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk menganalisis penelitian dengan judul : “Pengaruh Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dan Pendidikan Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, namun hingga saat ini penurunan kemiskinan masih belum signifikan.
- b. Pemerataan pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah dan mulai menunjukkan hasil, namun posisi perempuan dalam dunia pekerjaan tidak sebanding dengan pemerataan pendidikan.
- c. Ketika perempuan berpendidikan menikah memiliki peluang keluar dari pasar tenaga kerja.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang melandasi penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh pendidikan perempuan dalam mengurangi kemiskinan?
- b. Bagaimana pengaruh partisipasi tenaga kerja perempuan dalam mengurangi kemiskinan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh pendidikan perempuan terhadap tingkat kemiskinan
- b. Mengetahui pengaruh partisipasi perempuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk sumber dan sebagai bahan masukan kepada para penulis lain untuk ikut menggali dan juga melakukan percobaan (eksperimen) mengenai pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan dan pendidikan perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- b. Sebagai sarana bahan pertimbangan untuk badan pemerintah yang akan mengembangkan dan meningkatkan persisteman pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan.
- c. Bagi pemerintah, masyarakat, dan akademisi dapat sebagai informasi mengenai permasalahan kemiskinan.
- d. Bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan bagi pemerintah.
- e. Menambah ilmu dan wawasan penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut World Bank (2007), kemiskinan merupakan keadaan ketika seseorang tidak dapat merasakan pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tidak dapat memenuhi aspek kemiskinan seperti pemenuhan konsumsi, rendahnya tingkat pendidikan, fasilitas kesehatan maupun infrastruktur. Menurut Arsyad (1992:190) kemiskinan muncul akibat masyarakat tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang tersedia bagi masyarakat. Menurut Andre Bayo Ala (1981) dalam Arsyad (1992:188) kemiskinan merupakan multidimensional. Artinya, manusia memiliki kebutuhan yang bervariasi begitu pula kemiskinan memiliki beberapa aspek. Aspek kebijakan umum, mencakup aspek primer berupa miskin modal, organisasi yang berkaitan dengan sosial politik, pengetahuan, dan kemampuan. Sedangkan dari aspek sekunder meliputi kurangnya hubungan antar individu dengan kelompok, sumber pendapatan, dan pengetahuan.

Jadi, istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan. Menurut BPS (2010) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat.

Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai dan kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu. Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty threshold*). Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Menurut Adisasmita, (2005) indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak

usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita,2015).

2.1.1.2 Ukuran Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit (BPS, 2018). Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan. Menurut BPS (2010) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin (PM). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin di sebuah provinsi dibagi jumlah penduduk di provinsi tersebut. Menurut World Bank (2007), garis kemiskinan diukur dari pendapatan masyarakat yang penghasilannya berada per hari di bawah US\$ 1.

Jadi, seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,25 per hari dan US\$ 2 per hari masuk dalam kategori miskin (world bank, 2009). Terdapat tiga ukuran kemiskinan menurut World Bank diantaranya yaitu :

- Indeks Angka Kemiskinan (*Poverty Headcount Index*, P0) merupakan jumlah penduduk dengan tingkat konsumsinya di bawah garis yang tergolong miskin yang sering disebut angka insiden kemiskinan (*Poverty Incidence*). Ukuran kemiskinan ini tidak ada perubahan walaupun penduduk miskin menjadi lebih sejahtera atau lebih miskin, sepanjang seseorang tetap berada di bawah garis kemiskinan.
- Indeks Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan penyusutan dalam konsumsi terhadap garis kemiskinan penduduk secara keseluruhan. Penduduk yang tingkat kemiskinannya berada di atas garis kemiskinan diberi nilai 0 (nol) tetapi nilai tersebut tidak dapat mengubah status miskin walaupun telah mendapatkan bantuan dan tetap berada di bawah garis kemiskinan sehingga masih dikatakan miskin.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) merupakan ukuran yang dihitung dari mengkuadratkan penurunan konsumsi perkapita

terhadap garis kemiskinan. Apabila penduduk miskin membantu sesama penduduk miskin maka akan mengurangi kemiskinan.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai dan kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- Kemiskinan absolut, kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, tempat tinggal dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Jadi, kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dilihat dari tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi dalam kebutuhan pokok maupun kebutuhan dasar yang minimum. Terdapat dua unsur kebutuhan dasar yaitu: pertama, kebutuhan yang mencakup tuntutan minimum seperti makanan yang tercukupi, tempat tinggal, pakaian dan peralatan rumah tangga. Kedua, kebutuhan pelayanan sosial diberikan oleh dan untuk masyarakat berupa air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural. Apabila pendapatan tidak dapat tercapai maka orang dapat dikatakan miskin.
- Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan relatif

merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan ini terjadi akibat ketimpangan sosial. Ketika pendapatan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar yang minimum, tetapi masih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya dan orang tersebut masih dikatakan miskin. Kemiskinan ini terjadi karena ditentukan dari keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan.

- Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Jadi, kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan ini berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Menurut Mulyadi, M. (2017),

kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Kemiskinan alamiah adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat kondisi alami seseorang, misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja. Selain itu, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, penggunaan teknologi yang rendah maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kemiskinan alamiah lebih kepada kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik yang harus diterima sejak lahir atau mungkin mengalami musibah kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan ia tidak mampu bekerja sehingga menganggur dan pada akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan alamiah yang terjadi di Indonesia banyak dialami oleh petani. Kemiskinan tersebut dapat dilihat pada kualitas sumber daya alam sehingga peluang produksi menjadi kecil. Dalam lingkup pertanian, sumber daya yang mempengaruhi munculnya kemiskinan adalah kualitas tanah yang relatif kurang subur, dan iklim.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan ini lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Menurut Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021), kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang.

Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin (PM). Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan: jumlah penduduk miskin di sebuah provinsi dibagi jumlah penduduk di provinsi tersebut. Sedangkan Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,25 per hari dan US\$ 2 per hari masuk dalam kategori miskin (world bank, 2009).

2.1.1.4 Faktor Penyebab kemiskinan

Menurut World Bank (2007) penyebab kemiskinan disebabkan faktor korelasi yang terdiri dari :

- a. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi berhubungan dengan konsumsi rumah tangga yang juga tinggi. Setiap ada peningkatan pendidikan di suatu wilayah maka daerah yang tingkat pendidikannya tinggi akan berpengaruh besar dalam mengentas kemiskinan dibandingkan daerah yang tingkat pendidikannya tergolong rendah, selain itu juga mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah.
- b. Pekerjaan. Pekerjaan yang terdiri dari sektor formal dan sektor non formal. Apabila terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor formal ke sektor non formal ataupun sebaliknya secara keseluruhan dapat mengurangi kemiskinan di suatu daerah.
- c. *Gender*. Tingkat kemiskinan di suatu daerah yang perekonomiannya masih rendah dapat mengurangi kesejahteraan dalam keluarga. Khususnya perempuan

apabila menjadi kepala keluarga. Sedangkan rumah tangga yang dipimpin seorang laki-laki tingkat kemiskinannya rendah dengan pengeluaran yang tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin perempuan karena memiliki akibat yang besar seperti ketidakmampuan dalam menghadapi konflik, masalah dari segi kesehatan, dan kerugian ekonomi.

d. Pelayanan dan Infrastruktur. Terdapat akses yang rendah dalam fasilitas maupun infrastruktur yang berhubungan langsung dengan tingkat kemiskinan. Dalam bidang kesehatan maupun pendidikan dibutuhkan dalam mengentas kemiskinan. Sebagai pendorong peningkatan indeks pembangunan manusia yang berkualitas. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia di setiap daerah dan di setiap bidang maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Lokasi Geografis. Lokasi geografis di setiap daerah sebagai penentu ketidakmerataan antar wilayah. Dapat dilihat dan dibandingkan dari daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Kemiskinan terjadi tidak hanya di daerah pedesaan tetapi juga di daerah perkotaan.

Menurut Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kepemilikan aset.

a) Tingkat pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Menurut Notoatmodjo (2010) pendidikan adalah upaya persuasi atau pembelajaran kepada masyarakat, agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Perubahan atau tindakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dihasilkan oleh pendidikan kesehatan ini didasarkan kepada pengetahuan dan kesadarannya melalui proses pembelajaran, sehingga perilaku tersebut diharapkan akan berlangsung lama dan menetap, karena didasari

oleh kesadaran. Jadi, pendidikan adalah upaya persuasif yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan dimasa yang akan datang. Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran (Ihsan, 2005).

Manusia memerlukan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, dan dapat mandiri melalui pendidikan. Produktivitas kerja memerlukan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan karyawan maka kinerja karyawan akan menjadi lebih baik dan tujuan dari perusahaan akan tercapai dengan sempurna (Uyoh, 2006). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan menurut Hasbullah (2003) diantaranya yaitu ideologi, sosial ekonomi, sosial budaya, perkembangan IPTEK dan psikologi.

- Ideologi. Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan.
- Sosial Ekonomi. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- Sosial Budaya. Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya.
- Perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju.
- Psikologi. Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai.

Menurut Green (1980) bahwa tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar, mereka yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan memberi respon yang rasional daripada mereka yang berpendidikan rendah. Orang yang mempunyai

pendidikan tinggi diharapkan lebih peka terhadap kondisi keselamatannya, sehingga lebih baik dalam memanfaatkan fasilitas keselamatan (Green, 1980).

b. Tingkat Kesehatan

Menurut Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021), Kesehatan adalah salah satu kebutuhan utama seluruh penduduk, oleh sebab itu kesehatan adalah hak bagi setiap penduduk yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Menurut Juanita (2002) kesehatan adalah salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, maka kondisi kesehatan sekelompok penduduk tersebut harus baik. Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan juga harus diperhatikan.

Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia maka keduanya harus berjalan seimbang. Pembangunan kesehatan merupakan sebuah proses perubahan terhadap tingkat kesehatan sekelompok penduduk dari tingkat yang kurang baik menjadi tingkat yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.

c. Kepemilikan Aset

Rendahnya tingkat kepemilikan aset merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan (Kuncoro, 2004). Kepemilikan aset oleh rumah tangga akan mempengaruhi akses pasar yang dapat dilakukan oleh rumah tangga. Menurut Nanga (2005) kepemilikan aset mencerminkan kekayaan suatu rumah tangga yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga tersebut. Sedangkan menurut Sahdan (dalam Nasir,dkk: 2008), kepemilikan aset diartikan sebagai kepemilikan alat-alat produktif oleh suatu rumah tangga yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh rumah tangga dari kepemilikan aset tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan aset oleh rumah

tangga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan rumah tangga adalah tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan memiliki dampak yang kuat terhadap kemiskinan. Pada rumah tangga, tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh kepala rumah tangga merupakan hal sangat vital. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghasilan (Simanjuntak, 1985) dan kepala rumah tangga merupakan sumber penghasilan utama dalam rumah tangga. Sehingga pendidikan yang telah ditempuh oleh kepala rumah tangga menjadi faktor yang penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga. Menurut Grouder(2005) pencapaian tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang lebih tinggi akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, sehingga pendidikan merupakan cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Jenis pekerjaan utama dalam rumah tangga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan rumah tangga. Jenis pekerjaan utama dalam rumah tangga merupakan faktor penentu besarnya pendapatan (dan pengeluaran) yang diterima oleh rumah tangga (Gounder, 2005).

Menurut Butar (2008) pekerjaan utama kepala rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu rumah tangga, hal ini dikarenakan tiap jenis pekerjaan memiliki tingkat upah yang berbeda-beda. Pada sektor pertanian tingkat upah minimum yang akan diterima oleh pekerjaannya akan lebih rendah dibandingkan pada sektor lain dan di Indonesia mayoritas kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja pada sektor pertanian baik dalam sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan maupun perikanan. Jumlah tanggungan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga. Jumlah tanggungan dalam rumah tangga ditunjukan dengan besarnya jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja berkorelasi negatif dengan konsumsi dan pendapatan perkapita tiap anggota keluarga (Lanjouw dan Ravallion, 1995). Menurut Mok T.Y (2010) jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak-anak, anggota usia produktif yang tidak bekerja dan lansia) kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi kemiskinan rumah tangga.

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, ketika lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of women*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploatif intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- i. *Internal political fragmentation and civil strife*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

j. *International process*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Menurut BPS, suatu penduduk dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan dasar makanan, maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Kemampuan pendapatan yang rendah ini akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-ratanya, seperti standar kesehatan dan pendidikan. Namun, tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak juga merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Lalu, menurut Basri (1995), suatu rumah tangga dikatakan miskin apabila pendapatan yang diperolehnya oleh anggota keluarga yang bekerja tidak cukup untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Jika pendapatan tersebut tidak cukup atau hanya cukup untuk konsumsi saja, maka pembentukan modal pada rumah tangga miskin akan sangat rendah sehingga untuk memperbaiki taraf hidupnya juga sangat terbatas. Menurut Indraswari (2000), laki-laki dan perempuan mengalami kemiskinan secara berbeda dan memiliki kapasitas yang berbeda pula untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Adanya perbedaan tersebut karena adanya ketimpangan gender dan stigma yang pada akhirnya mayoritas penduduk miskin di dunia adalah wanita. Todaro (2003) mengatakan bahwa wanita adalah mereka yang paling menderita kemiskinan atau kekurangan gizi, namun mereka pulalah yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan berbagai bentuk jasa sosial yang lainnya. Adanya diskriminasi antar gender merupakan penyebab mayoritas penduduk miskin di dunia adalah wanita. Dalam hal pengupahan, rata-rata pekerja wanita hanya mendapatkan upah 70% dari pekerja pria untuk pekerjaan yang sama. Dalam hal tunjangan juga wanita mendapatkan tunjangan yang lebih rendah dibandingkan dengan pria.

Pekerja pria yang berstatus sudah menikah mendapatkan tunjangan keluarga, serta tunjangan kesehatan untuk dirinya dan keluarga. Sedangkan wanita yang berstatus menikah, tetap dianggap lajang dan hanya mendapatkan tunjangan

kesehatan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, total penghasilan wanita lebih rendah daripada pria.

2.1.2 Pendidikan Perempuan

Menurut Sukirno (1985:195), Kecakapan masyarakat untuk mempersiapkan dan melakukan pembangunan antara lain tingkat pendidikan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara untuk meningkatkan kemampuan dan menciptakan pembangunan ekonomi dengan mempertinggi tingkat pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan merupakan usaha untuk mengerti dan mewujudkan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki seperti keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Jalur pendidikan yaitu :

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. jenjang pendidikan formal :
 - a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs).
 - b. Pendidikan menengah, adalah lanjutan dari pendidikan sekolah dasar. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
 - c. Pendidikan tinggi, adalah lanjutan dari pendidikan jenjang pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

2. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan selain pendidikan formal yang dilakukan secara tersusun dan bertahap. Dilakukan untuk masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang bermanfaat sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan formal untuk mendukung pendidikan hingga usia dini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan keaksaraan.
3. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan dengan kegiatan belajar secara mandiri untuk keluarga dan lingkungan.

Ketika rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan (Todaro, 2000). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin cepat pula peningkatan penghasilan yang diharapkan, lebih besar dari biaya-biaya pribadi yang harus dikeluarkannya. Untuk dapat memaksimumkan selisih antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan, maka strategi optimal bagi seseorang adalah berusaha menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin (Todaro, 2000). Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan 26 antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan selama menjalani

pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang lebih tua, namun pendapatan mereka akan cepat naik daripada orang yang bekerja lebih awal.

Menurut Handayani (2018), pendidikan merupakan suatu usaha sadar serta terencana untuk mengembangkan potensi dirinya untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Handayani (2018) pula, untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan, sektor pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena untuk meningkatkan akumulasi modal. Jadi, dalam proses pendidikan terdapat proses belajar dan pembelajaran sehingga terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akumulasi modal. Menurut Maghfirah dan Zulham (2016), tingkat pendidikan merupakan unsur dasar dari pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk. Indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan (Todaro, 2000). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal 25 manusia (human capital) yang

menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin cepat pula peningkatan penghasilan yang diharapkan, lebih besar dari biaya-biaya pribadi yang harus dikeluarkannya. Untuk dapat memaksimumkan selisih antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan, maka strategi optimal bagi seseorang adalah berusaha menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin (Todaro, 2000). Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan 26 antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan selama menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja.

Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang lebih tua, namun pendapatan mereka akan cepat naik daripada orang yang bekerja lebih awal. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut pula. Ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia nya meningkat dan memiliki daya saing sehingga angka kemiskinan pun akan menurun. Pendidikan adalah hak setiap orang, baik pria maupun wanita. Menurut Pratomo (2017), adanya peningkatan yang pesat terhadap partisipasi pendidikan menyebabkan banyak wanita sekarang ini tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja, namun juga ikut bekerja di luar rumah. Prestasi wanita di Indonesia saat ini tidak lagi diukur dari keberhasilannya dalam mengelola rumah tangga saja, tetapi juga dalam berpendidikan, mengelola rumah tangganya, dan juga berkarir dalam pekerjaannya. Peningkatan partisipasi pendidikan wanita ini sejalan dengan menurunnya angka kelahiran di Indonesia, penundaan usia menikah, dan semakin banyak tersedianya pekerjaan yang relatif dekat dengan kemampuan wanita.

Selain itu, wanita juga memiliki peran yang penting dalam pendidikan untuk menciptakan generasi yang baik sebagai salah satu bagian dari penerus bangsa. Wanita yang berilmu pengetahuan atau memiliki pendidikan yang baik merupakan sebagai bekal untuk anak-anaknya kelak karena pendidikan pertama anak adalah

dari Ibunya. Pendidikan merupakan wujud dari investasi individu. Bila pendidikan yang ditempuh lebih tinggi, maka kemakmuran individu tersebut akan lebih tinggi dan berpengaruh pula pada kemakmuran perekonomian suatu negara. Pendidikan yang tinggi akan menambah wawasan dan kemampuan individu, sehingga berdampak pula pada pendapatan yang meningkat. Maka, dapat disimpulkan tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan individu tersebut. Pengukur dimensi pendidikan masyarakat yang kami tentukan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Secara umum asumsi yang berlaku, jika tingginya pendidikan yang ditempuh individu, menyebabkan tinggi pula kualitas dan pemikiran orang tersebut. Rata-rata Lama Sekolah wanita dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk wanita dalam menjalani pendidikan formal. Untuk menghitung rata-rata lama sekolah wanita ialah dengan cara:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Yaitu:

RLS = rata-rata lama sekolah penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas

x_i = lama sekolah penduduk perempuan

N = jumlah penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas

2.1.3 Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan

Konsep tingkat partisipasi angkatan kerja menurut BPS adalah prosentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tenaga kerja perempuan adalah penduduk perempuan yang telah memasuki usia produktif yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Salah satu indikator yang sering

digunakan untuk melihat kemajuan wanita dari perspektif ekonomi adalah dengan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Konsep definisi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan.

Bila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga. Keadaan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan sosial budaya. Dalam analisis Caroline Moser mengenai pendekatan kesamaan (*equity approach*) pada Women In Development yang berada di bawah naungan PBB, mengakui bahwa perempuan merupakan partisipasi aktif dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif. Bila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga. Keadaan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan sosial budaya. Dalam analisis Caroline Moser mengenai pendekatan kesamaan (*equity approach*) pada *Women In Development* yang berada di bawah naungan PBB, mengakui bahwa perempuan merupakan partisipasi aktif dalam proses pembangunan yang mempunyai sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif.

Menurut Sumarsono (2009), tugas dan peran perempuan Indonesia dalam kehidupan semakin hari semakin meningkat. Perempuan saat ini tidak hanya aktif dalam bidang keluarga, tetapi telah menunjukkan dinamisme dalam bidang kehidupan masyarakat yang tentunya membutuhkan peran perempuan. Perempuan yang aktif atau berusaha mencari nafkah (bekerja) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemauan perempuan untuk mandiri secara ekonomi, yaitu berusaha untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan mungkin untuk mencukupi kebutuhan orang yang bergantung pada mereka. Selain itu, perlu untuk menambah

atau memperkuat pendapatan keluarga atau rumah tangga. Kesempatan kerja yang lebih luas menarik tenaga kerja perempuan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja. Definisi tenaga kerja di Indonesia adalah setiap penduduk yang berada dalam rentang usia kerja yaitu mereka yang berusia mulai dari 15 tahun ke atas dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Usia produktif bekerja adalah dari 15 hingga 65 tahun. Berdasarkan kegiatan utamanya, tenaga kerja dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kemudian Angkatan Kerja dibagi lagi berdasarkan status kegiatannya yaitu yang bekerja dan yang menganggur. Angkatan Kerja adalah mereka yang sudah dan bersedia untuk bekerja, yaitu yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah penduduk yang bekerja. TPAK merupakan proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Untuk menghitung tingkat partisipasi Angkatan kerja adalah dengan cara:

$$\text{Tingkat partisipasi angkatan kerja} = a/b \times 100\%$$

Yaitu:

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15 tahun keatas

Perhitungan tingkat partisipasi Angkatan kerja memiliki kegunaan yaitu untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi tingkat partisipasi Angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Pendidikan terhadap Kemiskinan

Pendidikan sebagai salah satu faktor kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka kemiskinan akan berkurang. Menurut Simons (dalam Todaro, 2000), pendidikan adalah salah satu cara untuk mengentas

kemiskinan. Masyarakat yang tergolong miskin mengharapkan pekerjaan yang lebih baik serta pendapatan yang tinggi, sehingga harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Namun, pendidikan tinggi hanya mampu ditempuh oleh orang berpenghasilan tinggi. Sedangkan, orang yang tergolong miskin tidak memiliki dana yang memadai untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi, seperti universitas. Menurut penelitian Wiguna (2013) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Ketika hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivier (2015) menunjukkan bahwa peningkatan capaian pendidikan perempuan relative terhadap laki-laki menunjukkan dampak positif dan signifikan pada perekonomian. Hal ini diperkuat dengan penelitian Ribut (2016) yang melakukan analisis berdasarkan gender, ditemukan bahwa ternyata pengaruh pendidikan terhadap pendapatan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Dalam hal ini pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender.

Dalam Penelitian Rofiq (2016) menunjukkan bahwa secara signifikan jenjang pendidikan dasar tenaga kerja berperan meningkatkan kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Menurut penelitian dari Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021), Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pendidikan dan kemiskinan. Artinya apabila pendidikan mengalami kenaikan akan menekan kenaikan kemiskinan. Todaro (1994) menemukan bahwa sebagian besar penelitian ekonomi di negara maju dan berkembang telah berfokus pada hubungan antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja dan tingkat produksi selama beberapa tahun. Hal ini tidak mengherankan, karena tujuan utama pembangunan pada 1950-an dan 1960-an adalah memaksimalkan laju pertumbuhan produksi total. Akibatnya, dampak pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan. Selain itu, Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan dasar pembangunan.

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitasnya

untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivier (2015) menunjukkan bahwa peningkatan capaian pendidikan perempuan relative terhadap laki-laki menunjukkan dampak positif dan signifikan pada perekonomian. Hal ini diperkuat dengan penelitian Ribut (2016) yang melakukan analisis berdasarkan gender, ditemukan bahwa ternyata pengaruh pendidikan terhadap pendapatan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Dalam hal ini pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender. Dalam Penelitian Rofiq (2016) menunjukkan bahwa secara signifikan jenjang pendidikan dasar tenaga kerja berperan meningkatkan kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

2.2.2 Hubungan Partisipasi Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan

Peranan wanita dalam memasuki dunia kerja dipengaruhi oleh faktor ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup, meningkatnya lapangan pekerjaan dan semakin banyak kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan wanita. Menurut Sudarmini (2006), profesi sebagai ibu rumah tangga dan wanita yang bekerja sebagai pilihan yang tidak selalu karena kurangnya penghasilan, tetapi dalam rumah tangga yang tergolong miskin adalah sebuah kewajiban bagi seorang istri untuk berperan ganda dalam keluarganya dengan meluangkan waktu untuk mengurus rumah tangga dan bekerja sehingga pendapatan keluarga semakin meningkat. Sedangkan penghasilan perempuan yang sebagai ibu rumah tangga dan bekerja, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenjang pendidikan, jam kerja, bentuk pekerjaan dan jumlah beban dalam keluarga. Menurut penelitian Widyasworo (2014) menyatakan bahwa partisipasi tenaga kerja wanita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitian Widyasworo (2014) menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Partisipasi Tenaga Kerja Wanita berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Saragih (2006), kemiskinan dipengaruhi oleh pengangguran dan tingkat pendidikan secara signifikan. Jika pengangguran meningkat dalam hal ini partisipasi tenaga kerja menurun maka kemiskinan akan meningkat. Sedangkan

menurut Shiddiqoh dan Hasna Priyarsono (2016), Variabel pekerja wanita berpengaruh paling besar terhadap tingkat kemiskinan karena alasan wanita turun ke dunia kerja lebih dominan disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga. Perekonomian keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga.

Dari penghasilan kepala keluarga atau suami. Namun, dalam kemiskinan saat ini, istri juga berkontribusi dalam pendapatan keluarga. Bekerja sebagai ibu rumah tangga tidak serta merta berkaitan dengan pendapatan, tetapi dalam keluarga miskin sangat penting bagi istri dalam keluarga miskin yang berperan ganda dalam keluarga dan perlu membagi waktu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Faktor-faktor yang berpengaruh seperti usia, tingkat pendidikan, jam kerja, jenis pekerjaan, dan jumlah perempuan tergantung dari pendapatannya (Sudarmini, 2006). Usia memiliki pengaruh besar pada pendapatan Anda. Karena semakin tua seorang wanita, semakin kurang produktif dia, semakin lemah dia, dan semakin sedikit dia dapat menghasilkan uang untuk keluarganya. Di sebagian besar keluarga miskin di Indonesia, peran perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga, untuk bertahan hidup, atau setidaknya bekerja secara mental dan rela berkorban demi kepentingan anak, dengan sedikit pendapatan atau infrastruktur, sangatlah penting. Tidak mendukung keberadaan mereka. Oleh karena itu, dukungan dan kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri dan lebih meningkatkan kesejahteraannya sangat strategis. Dalam penelitian Widyasworo (2014) menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Saragih (2006) dalam skripsi Anwar Rasyadi bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh pengangguran dan tingkat pendidikan secara signifikan. Jika pengangguran meningkat dalam hal ini partisipasi tenaga kerja menurun maka kemiskinan akan meningkat.

2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, Tahun Jurnal	Metode Analisis	Hasil
1.	<i>Impact of female education on poverty reduction: an evidence from Pakistan</i> (Prof. Dr. Abdul Ghafoor Awan & Aasma Malik. 2020)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan ARDL untuk menganalisis data dan menarik hasil. Untuk mengukur dampak pendidikan perempuan terhadap kemiskinan, peneliti mengumpulkan data dari indikator Pembangunan Dunia dan Survei Ekonomi Pakistan untuk periode 1996 hingga 2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara pendidikan perempuan dan kemiskinan, yang berarti peningkatan pendidikan perempuan akan menurunkan tingkat kemiskinan.
2.	<i>Women and poverty: insights from individual consumption in Albania</i> (Gianni Betti, Lucia Mangiavacchi, dan Luca Piccoli. 2019)	Metode yang digunakan dengan sistem kurva Engel yaitu pengeluaran individu dimodelkan sebagai variabel penjelas, diasumsikan diukur dengan kemungkinan kesalahan non	Dari metode pendekatan dalam penelitian ini menghasilkan bahwa pendekatan yang diterapkan pada analisis kemiskinan individu di Albania, mengungkapkan ketidaksetaraan dalam rumah tangga yang cukup besar yang secara khusus

		random, dan karenanya dikoreksi untuk memperkirakan konsumsi individu dari data pengeluaran rumah tangga.	mempengaruhi perempuan dan berkorelasi dengan ketidakseimbangan dalam rasio jenis kelamin yang disebabkan oleh migrasi masa lalu. Hal ini mengarah pada peningkatan umum yang diharapkan dalam tingkat kemiskinan, terutama didorong oleh masalah yang sebelumnya tidak dipahami, kemiskinan perempuan, yang muncul sebagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan anti-kemiskinan di masa depan.
3.	<i>Women and Poverty: A Gender-Sensitive Approach</i> (Bastos, Amalia, Sara F. Casaca, Fransisco Nunes, and Jose Pereirinha. 2009)	Metodologi yang digunakan terdiri atas pendekatan <i>cross sectional</i> dan analisis dinamis kemiskinan yang menggunakan data dari <i>European Community Household Panel</i> (ECHP) tahun 1995-2001.	Hasilnya menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan akan kemiskinan perempuan, diantaranya adalah isu-isu yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja, ibu tunggal, penuaan, dan pendidikan.

4.	Pendidikan dan partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia: analisis terhadap hipotesis kurva-U (Devanto Shasta Pratomo, 2017)	Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi probit dengan data cross-section yang didapatkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015. Analisis tersebut digunakan untuk melihat secara empiris eksistensi hipotesis kurva-U tentang hubungan antara pendidikan dan partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peranan yang penting terhadap partisipasi angkatan kerja wanita. Kelompok wanita dengan pendidikan yang sangat rendah cenderung memiliki partisipasi angkatan kerja yang tinggi, karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang memaksanya untuk masuk ke pasar kerja. Namun, pada wanita dengan pendidikan menengah, partisipasi angkatan kerja wanita cenderung menurun, karena kalah bersaing dengan orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan kurangnya skill untuk menembus sektor kerja. Sedangkan wanita dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung partisipasi angkatan kerjanya tinggi karena
----	--	---	---

			dorongan upah dan semakin banyaknya ketersediaan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan wanita.
5.	Analisis pengaruh pendidikan, kesehatan, dan angkatan kerja wanita terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi kasus tahun 2008-2012) (Radhitya Widyasworo. 2014)	Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data time series.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, dan partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Gresik mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pendapatan.
6.	Peran Wanita Tani Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. (Wahyuni, Nenny, dan Verry Yarda Ningsih. 2020)	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui penelusuran data rumah tangga miskin di Kecamatan Muara Kelingi. Sampel yang digunakan menggunakan <i>simple random sampling</i> dengan tingkat kepercayaan 80% dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan tani memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga karena sebanyak 84% wanita yang bersuami aktif menjadi buruh tani, 12% perempuan petani aktif dalam mengorganisir pertanian keluarga, dan 4% lainnya tidak terlibat

		data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara responden dengan panduan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas dan instansi terkait di Kabupaten Musi Rawas.	dalam kegiatan produktif di keluarga. Oleh karena itu, perempuan petani diharapkan dapat mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan.
7.	Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah Wanita yang Bekerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur (Putrizahrah, Anisah. 2019)	Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012-2017 dengan metode <i>Fixed Effect Model</i> . Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada empat, yaitu kemiskinan yang menggunakan data persentase penduduk miskin, pendidikan yang menggunakan data Rata-rata Lama	Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel independennya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan jumlah wanita yang bekerja ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Jadi, apabila terjadi peningkatan diantara ketiga variabel tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

		Sekolah (RLS), kesehatan yang menggunakan data Angka Harapan Hidup, dan jumlah wanita bekerja yang menggunakan data jumlah angkatan kerja wanita yang bekerja.	
8.	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan perempuan pada keluarga miskin di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung (Dance Amnesi. 2013)	Metode yang digunakan adalah <i>Proportionate Stratified Random Sampling</i> , diambil sampel sebanyak 124 KK di Kelurahan Kapal. Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pendapatan perempuan sebesar 49,07 persen. Umur, tingkat pendidikan, jam kerja, sifat pekerjaan dan jumlah tanggungan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan perempuan pada keluarga miskin di Kelurahan Kapal.
9.	Perempuan dan Kemiskinan	Metode yang digunakan yaitu	Ketimpangan gender memperparah kemiskinan

	(Indraswari. 2009)	dengan menggunakan data kuantitatif di tingkat makro dan data kualitatif di tingkat mikro mendukung pernyataan di awal makalah ini bahwasanya di kalangan orang miskin perempuan adalah kelompok termiskin dan mencerminkan kuatnya budaya patriarki yang menomorduakan perempuan.	perempuan dan sebaliknya kemiskinan itu sendiri berkontribusi terhadap semakin tajamnya ketimpangan gender. Sangat penting mengakomodasi masalah ketimpangan gender dalam penentuan kriteria kemiskinan. Wacana kemiskinan tidak dapat meniadakan masalah perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan miskin dan perbedaan kapasitas laki-laki dan perempuan dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, karena perempuan pada umumnya – miskin atau tidak miskin – sejak awal berangkat dengan “modal” (pendidikan, akses ekonomi, dll.) yang berbeda dari laki-laki.
10.	Tamba, W., Rizka, M. and Andriani, I., 2020. Implementasi Pendidikan Masyarakat Melalui	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penentuan	Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan berbasis life

	Pemberdayaan Perempuan Berbasis Life Skill Education. Paedagogy, 7(3), pp.237 - 243.	subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan.	skill education dalam menjahit di Institut Modes Kartini yang telah dilaksanakan dengan lancar sesuai petunjuk teknis program. Dampak dari program tersebut adalah dapat meningkatkan kesejahteraan, memberikan keahlian dan keterampilan kepada perempuan untuk dapat menjadi wirausahawan dan meningkatkan perekonomian keluarga
11.	Pregiwati, R. P. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pernikahan Usia Dini, Tingkat Fertilitas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).	Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis statistik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia kecuali pendidikan.

12.	Nur Rizal, R., 2015. Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia? Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 16(1), pp.15-30.	Metode yang digunakan adalah analisis multivariat yaitu analisis non hirarki dan hirarki cluster. Analisis deskriptif dan regresi data panel.	Studi ini menunjukkan bahwa secara signifikan jenjang pendidikan dasar tenaga kerja berperan meningkatkan kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia.
13.	Juhaidi, Ahmad., & Umar, Masyithah. (2020). Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan di Indonesia, Masihkah Berkorelasi? 18(1), 1 - 24.	Data dari transkrip hasil wawancara diolah dengan pendekatan fenomenologi sedangkan data kuantitatif diolah dengan menggunakan SPSS 21 untuk menghitung korelasi pearsons (r) antara variabel pernikahan dini, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jika persentase pernikahan dini menurun, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup akan meningkat. Temuan ini penting untuk pengambil kebijakan, komunitas, serta tokoh agama untuk fokus pada dukungan terhadap pendidikan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini dan memutus siklus permasalahan yang terkait dengan pernikahan dini.
14.	Hadrinandar, F., 2019. Determinan	Jenis penelitian ini tergolong dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua). Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, 4(1), pp.1-12.	penelitian Kuantitatif asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih dengan E-views 10	tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh pergeseran usia kerja dan faktor subsisten, yaitu sekitar 63,83 persen penduduk Papua bekerja pada sektor pertanian. Kondisi tersebut tidak pernah bergeser selama beberapa tahun terakhir dan menyebabkan masyarakat Papua terperangkap dalam kemiskinan. Sedangkan tingkat pendidikan dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua, namun pengaruh PDRB memiliki elastisitas yang rendah.
--	--	---	---

Dari penelitian terdahulu dapat ditemukan bahwa :

1. Pendidikan Perempuan Menurunkan Kemiskinan

Sebagian besar studi menunjukkan bahwa pendidikan perempuan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin rendah tingkat kemiskinan.

2. Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Berperan dalam Pengurangan Kemiskinan

Beberapa studi mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

3. Ketimpangan Gender dan Kemiskinan Perempuan

Beberapa penelitian menyoroti bahwa kemiskinan perempuan memiliki karakteristik khusus akibat ketimpangan gender, patriarki, atau beban ganda.

4. Faktor Lain yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan perempuan bukan satu-satunya faktor, namun terkait erat dengan variabel lain seperti:

- Pernikahan usia dini
- Kesehatan dan angka harapan hidup
- Struktur rumah tangga (ibu tunggal, beban tanggungan, dll.)
- Sektor kerja (formal vs informal) dan jenis pekerjaan

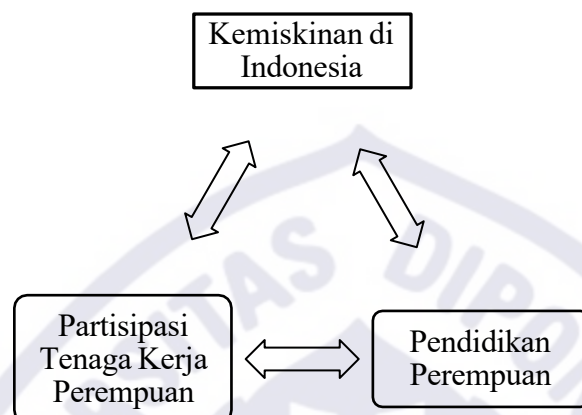
Maka dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu ini bahwa pendidikan perempuan dan partisipasi kerja perempuan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, artinya peningkatan kedua faktor ini cenderung menurunkan kemiskinan.

Terdapat hubungan kompleks antara pendidikan, kerja, dan kondisi sosial yang memperkuat atau memperlemah pengaruh terhadap kemiskinan (misalnya efek dari pernikahan dini, beban rumah tangga, dan struktur pasar tenaga kerja).

Kebijakan pengurangan kemiskinan harus mempertimbangkan dimensi gender dan menyediakan akses pendidikan serta kesempatan kerja yang setara bagi perempuan.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berikut bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Bagan di atas menggambarkan hubungan antara tiga variabel utama dalam penelitian, yaitu kemiskinan di Indonesia yang diletakkan di atas sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, partisipasi tenaga kerja Perempuan sebagai variabel independen, dan pendidikan perempuan sebagai variabel independen.

Panah ganda dua arah menghubungkan partisipasi tenaga kerja perempuan dan pendidikan perempuan, yang menandakan adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Kedua variabel independen tersebut juga dihubungkan dengan kemiskinan di Indonesia, menandakan bahwa, pertama, pendidikan perempuan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kedua, partisipasi tenaga kerja perempuan juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Ketiga, kemungkinan ada pengaruh tidak langsung antara pendidikan dan partisipasi kerja terhadap kemiskinan melalui keterkaitan satu sama lain.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a) Diduga bahwa partisipasi tenaga kerja perempuan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
- b) Diduga bahwa pendidikan perempuan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu Kemiskinan, Pendidikan, dan Partisipasi Tenaga Kerja.

3.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan dalam hal ini digambarkan dengan Persentase penduduk miskin memiliki pengertian penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010 – 2020 diambil dari data BPS.

3.1.2 Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan dalam hal ini digambarkan dengan variabel Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan dalam tahun menurut provinsi. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam hal ini menggunakan data Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin di Indonesia tahun 2010-2020 dari data BPS.

3.1.3 Partisipasi Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi tenaga kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Partisipasi dalam hal ini digambarkan dengan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia dalam persen menurut provinsi, menggunakan data persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen).

3.2 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, artikel, jurnal penelitian terdahulu. Data yang digunakan yaitu data Pendidikan Perempuan, Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan, Kemiskinan di Indonesia dalam rentang waktu 2010-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:147), pengertian analisis deskriptif adalah Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen (Pendidikan dan partisipasi tenaga kerja) dan variabel dependen (kemiskinan). Model operasional yang digunakan adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \mu_t$$

Yaitu:

Y_t = Tingkat Kemiskinan (%)

X_1 = Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (Presentase)

X_2 = Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan (Presentase)

μ_t = error



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, Dunia usaha dan *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui program pelayanan social meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan sosial dan Perlindungan sosial. Di Indonesia, masih banyak orang miskin yang tersebar di perkotaan dan pedesaan. Di antara masyarakat miskin di pedesaan, yang termiskin adalah mereka yang tinggal di daerah terpencil yang tidak terhubung dengan infrastruktur transportasi (darat, laut atau udara), atau bahkan ke pusat pertumbuhan terkecil (seperti desa atau kecamatan). Tidak ada kontak-regional pusat). Daerah terpencil ada di dalam dan di dalam pulau-pulau kecil. Di beberapa daerah pedesaan terpencil, masyarakat adat dan masyarakat umum tinggal. Mereka adalah masyarakat yang sangat terbelakang, tidak mampu mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan hampir tidak memiliki rasa perkembangan.

Kemiskinan adalah fenomena multidimensional. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai aspek, termasuk diantaranya aspek gender. Hal ini perlu dilakukan karena laki-laki dan perempuan mengalami kemiskinan secara berbeda dan memiliki kapasitas berbeda untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Perbedaan tersebut lahir dari ketimpangan gender yang berpadu dengan ketimpangan-ketimpangan lain yang dialami kelompok miskin. Pemerintah Indonesia dalam Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) mendefinisikan kemiskinan dari sudut pandang pemenuhan hak dasar yaitu “Kondisi seseorang dan sekelompok orang (perempuan dan laki-laki) yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan

kehidupannya secara bermartabat”. Diagnosa umum penyebab kemiskinan adalah kegagalan pemenuhan hak-hak dasar yaitu:

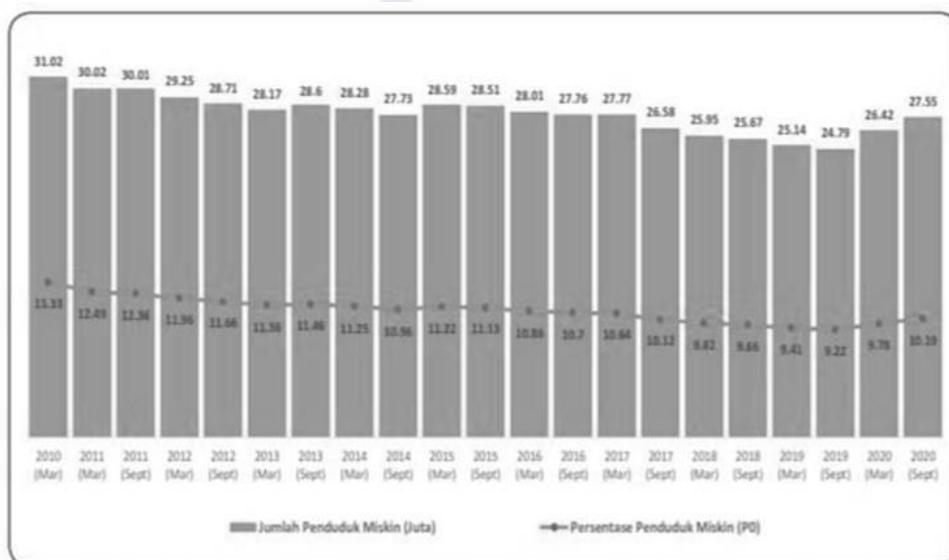
1. Terbatasnya kecukupan pangan dan mutu pangan
2. Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan
3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
5. Terbatasnya akses layanan perumahan
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih/aman dan sanitasi
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
8. Memburuknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup
9. Lemahnya perlindungan/jaminan hak atas rasa aman

Berdasarkan data dari BPS, Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020). Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp 458.947,- per kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 339.004,-

(73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 119.943,- (26,13 persen). Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,- /rumah tangga miskin/bulan. Hasil survei BPS pun memperlihatkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 1,32 persen sedangkan di pedesaan naik 0,60 persen.

Jika dilihat dari komposisi, jumlah penduduk miskin di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan dan tentunya ini perlu menjadi perhatian. Garis kemiskinan per kapita pun juga tercatat mengalami kenaikan dari Rp 454.652 per kapita pada Maret 2020 menjadi Rp458.947 per kapita. Kenaikan ini terjadi akibat kenaikan harga pangan yang menyumbang 73,87 persen pada garis kemiskinan. Ini harus diberikan perhatian ekstra pada komoditas pangan seperti beras dan sebagainya agar tidak mengalami fluktuasi. Profil kemiskinan RI dirilis setiap 2 kali dalam setahun yakni pada Maret dan September. Tingkat kemiskinan pada Maret 2020 adalah 9,78 persen dan tertinggi sejak Maret 2018. Sementara tingkat kemiskinan pada September 2020 merupakan tertinggi sejak Maret 2017. Jumlah penduduk miskin pada September bertambah 1,13 juta dibandingkan dengan Maret 2020. Jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin naik 2,76 juta orang. Sedangkan, kalau dibandingkan September 2019 ke September 2020, persentase penduduk miskin meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Pada tahun 2012 kemiskinan di Indonesia berada di angka 29,25 juta. Selanjutnya, mengalami penurunan di tahun 2013 di angka 28,17 juta. Selanjutnya, mengalami kenaikan di tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 28,28 juta dan 28,59 juta. Tahun 2016, kembali mengalami penurunan di angka 28,01. Tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu 27,77 juta; 25,95 juta; dan 25,14 juta.

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia pada Tahun 2010-September 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2020

Tabel 9. Angka Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2020

4.1.2 Kondisi Tingkat Pendidikan Perempuan di Indonesia

Pendidikan masih dipandang sebagai privilese bagi sebagian kaum perempuan di Indonesia. Faktor ekonomi, interpretasi agama, konsepsi peran gender yang mengakar dalam budaya, serta mitos-mitos lainnya menjadi penyebab hal tersebut. Pendidikan masih dipandang sebagai privilese bagi sebagian kaum perempuan. Faktor ekonomi, interpretasi agama, konsepsi peran gender yang mengakar dalam budaya, serta mitos-mitos lainnya menjadi penyebab hal tersebut. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 2016, saat ini rata-rata perempuan hanya mendapat pendidikan sampai kelas dua sekolah menengah pertama (SMP). Dengan kata lain, rata-rata lama perempuan bersekolah hanya selama 7,5 tahun. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 menunjukkan, angka melek huruf pada perempuan lebih rendah dari laki-laki dengan berada di angka 94,33 persen dan laki-laki 97,48 persen. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat akses bekerja bagi perempuan terbatas. Hal ini bisa dilihat dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada 2018. Berdasarkan survei tersebut, terdapat selisih cukup tinggi pada angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan pada 2018, yaitu 82,69 persen berbanding 51,88 persen.

Perempuan diharapkan untuk memiliki pendidikan agar dapat menjadi teladan dan pribadi yang mandiri. Dengan begitu, perempuan tidak akan dipandang dengan sebelah mata. Meski kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu diperlukan, perempuan terlebih dahulu harus berjuang untuk dirinya sendiri. Sebab, kalau tidak, orang lain yang memperjuangkannya akan lelah. Banyak anggapan bahwa perempuan mesti dihargai lebih dulu. Ini bukan poin utamanya. Perempuan harus bisa menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu. Caranya, dengan mengaktualisasi diri di tengah masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Harapannya ke depan, perempuan harus lebih banyak belajar dan terdidik. Sebab, melalui pemahaman saja tidak cukup. Mereka harus berjuang menyuarkan sistem yang ada, tidak hanya sekedar wacana dan tidak dipolitisasi. Perempuan Indonesia sampai sekarang tidak dapat berbuat banyak karena masih

kentalnya sistem patriarki Tanah Air. Perempuan Indonesia Masih Tertinggal dalam Pendidikan. Kesetaraan untuk perempuan tidak bisa dilepaskan dari faktor pendidikan yang dapat membuka wawasan serta pikiran.

Pendidikan untuk perempuan telah diperjuangkan sejak lama di Indonesia. Raden Ajeng Kartini menjadi salah satu sosok perempuan yang dikenal gigih dalam memperjuangkan hal itu. Namun dalam kenyataannya, pendidikan untuk wanita belum merata di Indonesia. Karena kuatnya tradisi, banyak perempuan yang tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi. Faktor ekonomi dan patriarki seolah menjadi hal yang tidak dapat dielakkan oleh kaum perempuan. Padahal, pendidikan dapat menjadi peluang perempuan mensejahterakan hidupnya. Dengan pendidikan yang tinggi, perempuan dapat memberikan ilmu bagi dirinya dan orang sekitar. Perempuan juga dapat menaikkan derajat hidupnya. Angan-angan untuk sekolah itu masih banyak yang ragu, mereka para perempuan masih merasa takut. Banyak perempuan di beberapa daerah di pelosok Indonesia masih kurang mendapatkan pendidikan. Hal itu biasanya karena kurangnya fasilitas sekolah dan kebutuhan keluarga yang mewajibkan mereka menjadi tulang punggung. Wilayah Musi, Magelang, Bima, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Maluku adalah contoh wilayah yang masih tertinggal dalam hal pendidikan. Daerah-daerah ini tertinggal lantaran susah akses serta kurangnya fasilitas yang disediakan bagi masyarakat. Orang tua harus diedukasi soal pentingnya pendidikan, harus membuka wawasan dan harus memahami. Sosok panutan dalam pendidikan juga penting. Di daerah pelosok Yogyakarta masih banyak perempuan yang akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus dinikahkan demi kelangsungan hidup keluarga.

Meskipun perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus anak dan suami kala hidup berkeluarga, hal itu tidak dapat dijadikan penghalang bagi perempuan menggapai pendidikan setinggi-tingginya.

4.1.3 Kondisi Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia

Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Masih Didominasi Laki-laki di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada Februari

2019 meningkat sebesar 2,24 juta orang jika dibandingkan dengan Februari 2018 menjadi 136,18 juta orang. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pun naik 0,12% menjadi 69,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini mengindikasikan adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang meningkat. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin (gender), TPAK masih didominasi laki-laki dengan partisipasi sebesar 83,18%. Sementara itu, TPAK perempuan hanya sebesar 55,5%. Secara tahunan, TPAK laki-laki naik 0,17% sedangkan perempuan hanya naik tipis 0,06%. Penduduk usia kerja dibagi kedalam dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran terbuka, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Secara total, persentase perempuan yang bekerja sebesar 47,91 persen. Persentase perempuan yang bekerja di perkotaan sebesar 44,74 persen, sedangkan di pedesaan sebesar 51,10 persen. Sementara itu persentase total perempuan sebagai pengangguran terbuka sebesar 3,48 persen, persentase perempuan yang menganggur di perkotaan sebesar 3,93 persen dan di pedesaan sebesar 3,02 persen. Persentase perempuan yang mengurus rumah tangga secara total adalah 36,97 persen, dilihat menurut daerah tempat tinggal persentase perempuan yang mengurus rumah tangga di perkotaan sebesar 38,52 persen, sedangkan di pedesaan sebesar 35,41 persen (Gambar 6.1). Selanjutnya bila dilihat perbandingan kegiatan selama seminggu yang lalu antara perempuan dan laki-laki, persentase tertinggi baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah pada kelompok yang bekerja. Hal yang menarik adalah pada perbedaan persentase yang cukup besar, persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 47,91 persen sedangkan laki-laki sebesar 79,57 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja lebih dominan dibanding yang melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga yaitu hanya sebesar 1,63 persen, sedangkan perempuan yang bekerja tidak terlalu dominan karena persentase perempuan yang mengurus rumah tangga juga cukup tinggi yaitu sebesar 36,97

persen. Penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum perempuan. Perbandingan antar provinsi menunjukkan bahwa persentase tertinggi untuk perempuan yang bekerja terdapat di Bali sebesar 68,49 persen, sedangkan yang terendah di Sulawesi Utara sebesar 36,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja bagi perempuan di Bali cukup tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK perempuan di perkotaan sebesar 48,67 persen sedangkan di pedesaan yaitu sebesar 54,13 persen. Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 51,39 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu sebesar 84,42 persen. Selanjutnya berdasarkan TPAK di masing-masing Provinsi, terlihat bahwa TPAK perempuan tertinggi adalah di Provinsi Bali sebesar 69,89 persen, sedangkan TPAK laki-laki tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 88,36 persen.

4.2 Analisis Data

1. Uji T Statistik

Nilai probabilitas tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 0,3580 > 0,05, artinya bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. (2) Nilai probabilitas tingkat pendidikan sebesar 0,0034 < 0,05, artinya bahwa Pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2. Koefisien Determinasi Berganda

Nilai koefisien determinasi berganda dalam eviews pada label R-Squared sebesar 0.800820 yang berarti sekumpulan variabel prediktor di dalam model dapat menjelaskan variabel respon sebesar 80.0820%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti.

3. Adjusted R Square

Nilai adjusted R Square artinya nilai R Square yang telah terkoreksi oleh nilai standar error. Nilai adjusted r square sebesar 0.751025. Sedangkan nilai standar error model regresi 0.282279 ditunjukkan dengan *label S.E. of regression*. Nilai standar error ini lebih kecil dari pada nilai standar deviasi variabel respon yang ditunjukkan dengan label “S.D. dependent var” yaitu sebesar 0.565718 yang dapat diartikan bahwa model regresi valid sebagai model prediktor.

4. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Dari Hasil pengujian menggunakan Eviews 10, uji data menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,001574 lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel pendidikan perempuan dan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

5. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas residual di atas adalah nilai jarque bera sebesar 1.007589 dengan p value sebesar 0,604234, ketika $> 0,05$ sehingga menolak H_1 atau yang berarti residual berdistribusi normal.

6. Uji Multikolinearitas

Hasil menunjukkan bahwa nilai Centered VIF baik tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan dan Pendidikan perempuan adalah 1.442258, yang artinya nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi.

7. Uji Autokorelasi

Perhatikan nilai Prob Chi Square (2) yang merupakan nilai p value uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, yaitu sebesar 0.1309, yaitu $> 0,05$ sehingga menerima H_0 atau yang berarti tidak ada masalah autokorelasi serial.

8. Uji Heteroskedastisitas

Nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. chi square (2) pada Obs*R-Squared yaitu sebesar 0.2115. Oleh karena nilai p value $0.2115 > 0,05$ maka terima H_0 atau yang berarti model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pendidikan Perempuan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji statistik parsial (uji t), diketahui bahwa pendidikan perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0034 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi.

Temuan ini sejalan dengan hasil dari berbagai penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Awan & Malik (2020), Bastos et al. (2009), dan Rizal (2015), yang menyimpulkan bahwa pendidikan perempuan merupakan faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan peluang kerja perempuan, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga.

4.3.2 Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan terhadap Kemiskinan

Berbeda dengan pendidikan, hasil uji t terhadap variabel partisipasi tenaga kerja perempuan menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (nilai probabilitas sebesar $0,3580 > 0,05$). Artinya, meskipun perempuan bekerja, hal tersebut belum tentu berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan.

Temuan ini bertolak belakang dengan sebagian hasil penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Pratomo (2017), Widyasworo (2014), dan Wahyuni et al. (2020), yang menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia kerja dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan.

Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa kemungkinan, seperti:

1. Perempuan banyak bekerja di sektor informal atau berpenghasilan rendah.

2. Partisipasi kerja perempuan dipicu oleh kebutuhan ekonomi, bukan oleh kualitas keterampilan atau kualifikasi.
3. Terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak bagi perempuan, terutama mereka dengan tingkat pendidikan menengah atau rendah.

4.3.3 Pengaruh Simultan dan Kompleksitas Faktor Sosial

Meski secara parsial partisipasi kerja perempuan tidak signifikan, namun hasil uji F menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan partisipasi kerja perempuan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (nilai probabilitas F sebesar $0,001574 < 0,05$). Ini menandakan bahwa kombinasi kedua variabel ini secara kolektif memiliki kekuatan dalam menjelaskan variasi kemiskinan.

Model ini diperkuat oleh nilai R-Squared sebesar 0.800820, yang berarti 80% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh model, dan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.751025, yang menunjukkan kekuatan model yang telah dikoreksi.

Temuan ini mencerminkan apa yang juga disampaikan dalam penelitian terdahulu, bahwa hubungan antara pendidikan, partisipasi kerja, dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, seperti:

1. Ketimpangan gender dan budaya patriarki (Indraswari, 2009)
2. Struktur rumah tangga dan pernikahan dini (Juhaidi & Masyithah, 2020)
3. Akses terhadap sektor kerja formal dan jenis pekerjaan (Dance, 2013)

Dengan kata lain, pengaruh pendidikan dan kerja perempuan terhadap kemiskinan tidak berdiri sendiri, tetapi sangat bergantung pada konteks sosial-ekonomi yang lebih luas.

4.4 Kebijakan Publik Terkait Upaya Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Strategi pengentasan kemiskinan melalui sinergi program pemberdayaan

masyarakat ialah upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, hal itu tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

Contoh lain dari upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut.

1. BLT: Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan bawah (miskin)
2. BOS: Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan pemerintah kepada anak-anak didik dari tingkat SD SLTP
3. RASKIN/BULOG: Beras dengan harga murah yang dialokasikan untuk masyarakat kelas bawah (miskin)
4. BBM bersubsidi

4.5 Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan

Kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dan didalam pembuatannya ada penyusunan. Kebijakan publik bisa terbentuk karena melewati tahap-tahap kebijakan publik. Berikut adalah kebijakan publik bidang pendidikan di Indonesia diantaranya yaitu :

- a. **Pergantian kurikulum.** Kebijakan publik di bidang pendidikan yang bisa kita lihat pertama adalah pergantian kurikulum pendidikan dalam beberapa tahun. Pemerintah melakukan hal ini bukan tanpa tujuan, pemerintah menerapkan kebijakan publik ini supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini selalu maju.

Pemerintah juga bahkan mengatur kebijakan pendidikan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Indonesia yang diarahkan salah satunya adalah melakukan pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik dan penyusunan ini dilakukan secara nasional.

b. Bantuan dana operasional sekolah (BOS). Seperti yang kita ketahui, pentingnya pendidikan bagi manusia tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu pemerintah tentu saja ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia karena pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan taraf bangsa dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu tentu saja pemerintah ingin membuat pendidikan di Indonesia ini lebih berkembang sehingga membuat kebijakan publik di bidang pendidikan yaitu dengan dibuatnya bantuan dana operasional sekolah atau yang selama ini kita kenal sebagai Dana BOS. Dana BOS ini adalah salah satu wujud kebijakan publik yang berguna untuk membangun sekolah menjadi lebih baik demi kenyamanan para siswa. Tidak hanya itu saja, namun kebijakan publik ini juga mencakup serta bantuan peralatan praktik di sekolah.

c. Penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah. Contoh kebijakan publik di bidang pendidikan yang selanjutnya adalah pemerintah membuat kebijakan publik berupa penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah dengan maksud dan tujuan supaya kebijakan publik yang satu ini dapat mencapai tujuan yaitu generasi penerus bangsa mendapatkan pengetahuan mengenai budaya Indonesia yang baik dan juga pendidikan karakter yang dapat mempengaruhi dan merubah moral anak bangsa menjadi lebih baik. Pentingnya pendidikan karakter merupakan salah satu faktor diterapkannya pendidikan budaya dan karakter sebagai wujud kebijakan publik di dalam bidang pendidikan. Dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan sekolah dapat membimbing dan membekali anak-anak dengan moral dan juga budi pekerti yang dapat berguna bagi masa depan mereka dan masa depan bangsa.

d. Penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran. Tidak hanya pelajaran penting saja seperti misalnya matematika, ipa, atau Bahasa Indonesia yang dipelajari ketika kita duduk di bangku sekolah. Namun ada juga pelajaran keterampilan dan muatan lokal yang juga kita pelajari ketika kita

bersekolah. Penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran ini sebenarnya adalah salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan. Muatan lokal sendiri adalah kegiatan ekstrakurikuler atau pelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi dan itu disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing dan materinya tidak dapat dikelompokkan pada mata pelajaran yang ada. Ini bertujuan supaya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah dan budaya daerah mereka karena kita tahu fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu penting adanya.

e. Beasiswa kepada guru untuk mengikuti program pascasarjana.

Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang selanjutnya adalah diberikannya beasiswa kepada guru untuk mengikuti program pascasarjana dan tentunya bagi guru yang memiliki kompetensi dan dengan melewati beberapa prosedur. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang satu ini bukan dibuat tanpa tujuan, kebijakan publik ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan SDM yang ada di dalam bidang pendidikan. Pemerintah pembuat kebijakan publik juga berharap dengan adanya kebijakan publik yang satu ini, maka guru diharapkan bisa memberikan ilmu yang lebih kepada murid-muridnya sehingga generasi penerus bangsa bisa membangun negara kita menjadi negara yang maju.

f. Pembentukan komite sekolah. Salah satu kebijakan publik di dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh pemerintah adalah pembuatan komite sekolah. Komite sekolah tidak hanya dibuat untuk menggalang dana saja. Komite sekolah didirikan guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) juga disebutkan jika komite sekolah yang merupakan salah satu kebijakan publik itu bertugas untuk mengawasi pelayanan dalam pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah dibuat, Kita juga harus mengetahui mengenai struktur komite sekolah yang menjadi salah satu contoh kebijakan publik di pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, Pemerintah juga telah menetapkan Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar diantaranya yaitu:

- a. **Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK–SD–SMP–SMA, informal).** Kebijakan pertama pada sistem pendidikan Merdeka Belajar yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Sebelumnya, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri atau sistem yang tertutup. Sekolah-sekolah juga terlalu fokus kepada administrasi dan peraturan yang terlalu membebani. Penerapan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah yaitu TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang coba untuk diwujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan.
- b. **Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah.** Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, sekolah-sekolah terlalu memfokuskan diri pada urusan administrasi pada sistem pendidikan sebelumnya. Program-program untuk pengembangan instrumen sekolah seperti guru dan kepala sekolah pun kurang diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan baru yang diusung menteri pendidikan tinggi, riset dan teknologi ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas / platform pembelajaran.

c. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi.

Kebijakan pendidikan baru yang ke-3 yaitu membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform yang dibangun terdiri dari 5 kriteria: berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Ketika platform tersebut sudah mulai digunakan, sekolah juga akan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi. Rencana dukungan tersebut mengenai tiga hal seperti biaya paket internet (*data cost*), ketersediaan perangkat belajar (*equipment availability*), dan konektivitas internet dan listrik untuk daerah 3T (*connectivity & electricity*).

d. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Perbaikan kurikulum nasional, pedagogi, dan sistem penilaian menjadi fokus pada kebijakan pendidikan yang baru dari Pak Nadiem. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi masa depan. Perbaikan-perbaikan yang dimaksud terdiri dari penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, serta fleksibel. Luaran dari perbaikan kurikulum yaitu terbentuknya karakteristik pelajar pancasila pada generasi masa depan. Pada pedagogi dan penilaian akan digunakan tiga sistem yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

e. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Kebijakan pendidikan baru yang ke-4 yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pendistribusian yang merata. Nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Pengawasan terkait anggaran, infrastruktur, penerimaan siswa (zonasi), dan guru, akan diawasi demi pendistribusian yang merata di setiap daerah.

f. Membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan. Kemendikbud juga merencanakan untuk dimulainya pembangunan sekolah atau lingkungan belajar untuk masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis

pengalaman. Aman dan inklusif meliputi fasilitas darurat/tanggap bencana, bebas kerusakan, ramah disabilitas, dan bebas dari perundungan/diskriminasi. Pemanfaatan teknologi meliputi kelas digital dengan akses internet, komputer untuk setiap anak, serta akses pembelajaran daring. Kolaboratif berarti kemudahan mengatur ruang kelas menjadi kelompok–kelompok untuk membangun kerja tim, empati, dan kepemimpinan. Aspek kreatif memungkinkan pengaturan ruang kelas sesuai kebutuhan/preferensi siswa atau guru untuk mengasah kreativitas. Sistem pembelajaran berbasis pengalaman dilakukan melalui eksplorasi, interaksi dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata.

g. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Pemberian insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan juga menjadi salah satu kebijakan pendidikan baru. Pemberian insentif meliputi dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lainnya berupa insentif keuangan dan penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan karena persyaratan nirlaba dan kepemilikan tanpa aset untuk yayasan dan proses perizinan yang kompleks, selama ini menjadi penghalang signifikan bagi sektor swasta atau mitra global untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan Indonesia.

h. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Kebijakan pendidikan baru yang ke–8 yaitu mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Pada pendidikan vokasi, pemerintah pusat akan membentuk program magang dan penempatan langsung dengan pemain industri. Pelatihan guru dan mempekerjakan praktisi industri juga menjadi rencana pada kebijakan ini. Pemerintah akan mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk menarik keterlibatan industri dan memungkinkan otonomi/fleksibilitas yang lebih besar.

i. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Kebijakan pendidikan baru yang ke–9 yaitu membentuk pendidikan tinggi kelas dunia dengan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat–pusat unggulan serta mempererat hubungan

dengan industri dan kemitraan global. Ada tiga target diferensiasi misi perguruan tinggi: 1) Membangun PT bereputasi dunia di setiap bidang sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa, 2) Membangun 1 PT unggul di setiap provinsi sebagai motor pembangunan daerah & nasional, 3) Perluasan akses PT dan membentuk ekosistem *lifelong learning*.

j. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Selama ini, mekanisme akreditasi terbilang rumit karena kewajibannya untuk memperbaharui akreditasi setiap 4 tahun dan berfokus pada aspek administratif. Pada kebijakan pendidikan yang baru ini, mekanisme akreditasi akan bersifat otomatis dan berbasis data dengan mengkombinasikan standar pemerintah dan komunitas sehingga berfokus pada hasil. Peningkatan kredibilitas dan mekanisme akreditasi memungkinkan otonomi dalam institusi pendidikan yang terdiri dari 4 aspek yaitu kurikulum/program, guru/dosen, kemitraan, dan pengoperasian/manajemen. Otonomi ini dapat diterapkan pada pendidikan tinggi dan/atau sekolah swasta. Kebijakan yang ke-10 ini bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri atau komunitas. Kebijakan publik di bidang pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu sedikit ditingkatkan. Kebijakan publik yang dibuat pemerintah berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu yang tentunya akan turut membangun bangsa kita.

4.6 Kebijakan Publik di Bidang Ketenagakerjaan

Dalam upaya memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara menyeluruh, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menetapkan tiga arah kebijakan strategis yang mendukung visi nasional dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Ketiga kebijakan tersebut mencakup: (1) penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif bagi pekerja dan pelaku usaha melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; (2) peningkatan perlindungan tenaga kerja serta perluasan penciptaan lapangan kerja; dan (3) pembentukan pasar kerja yang fleksibel dan efisien. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk membentuk sistem pendukung (*support system*) dalam pengembangan SDM Indonesia yang unggul dan kompetitif di era Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 138 juta orang, yang terdiri dari 128 juta penduduk bekerja dan 9,7 juta pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode tersebut tercatat sebesar 7,07%. Dampak pandemi Covid-19 turut memperburuk kondisi ketenagakerjaan nasional, dengan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi mencapai sekitar 29,12 juta orang.

Di tingkat provinsi, khususnya Provinsi Aceh, kondisi ketenagakerjaan juga mengalami tekanan. Data menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di provinsi ini mencapai sekitar 2,5 juta orang dengan angka pengangguran sebesar 167 ribu jiwa. TPT Provinsi Aceh tercatat sebesar 6,59%, mengalami peningkatan sebesar 0,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat sekitar 388 ribu penduduk usia kerja yang terdampak pandemi di wilayah tersebut.

Selain persoalan kuantitatif, tantangan ketenagakerjaan di Indonesia juga berkaitan dengan aspek kualitas SDM, kompetensi, dan produktivitas. Secara nasional, sekitar 57% pekerja memiliki tingkat pendidikan rendah (maksimal SMP), yang menunjukkan keterbatasan dalam penguasaan keterampilan kerja. Namun, untuk Provinsi Aceh, proporsi tenaga kerja dengan pendidikan rendah tercatat sebesar 46%, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pencapaian pendidikan tenaga kerja di daerah tersebut dan merupakan perkembangan positif.

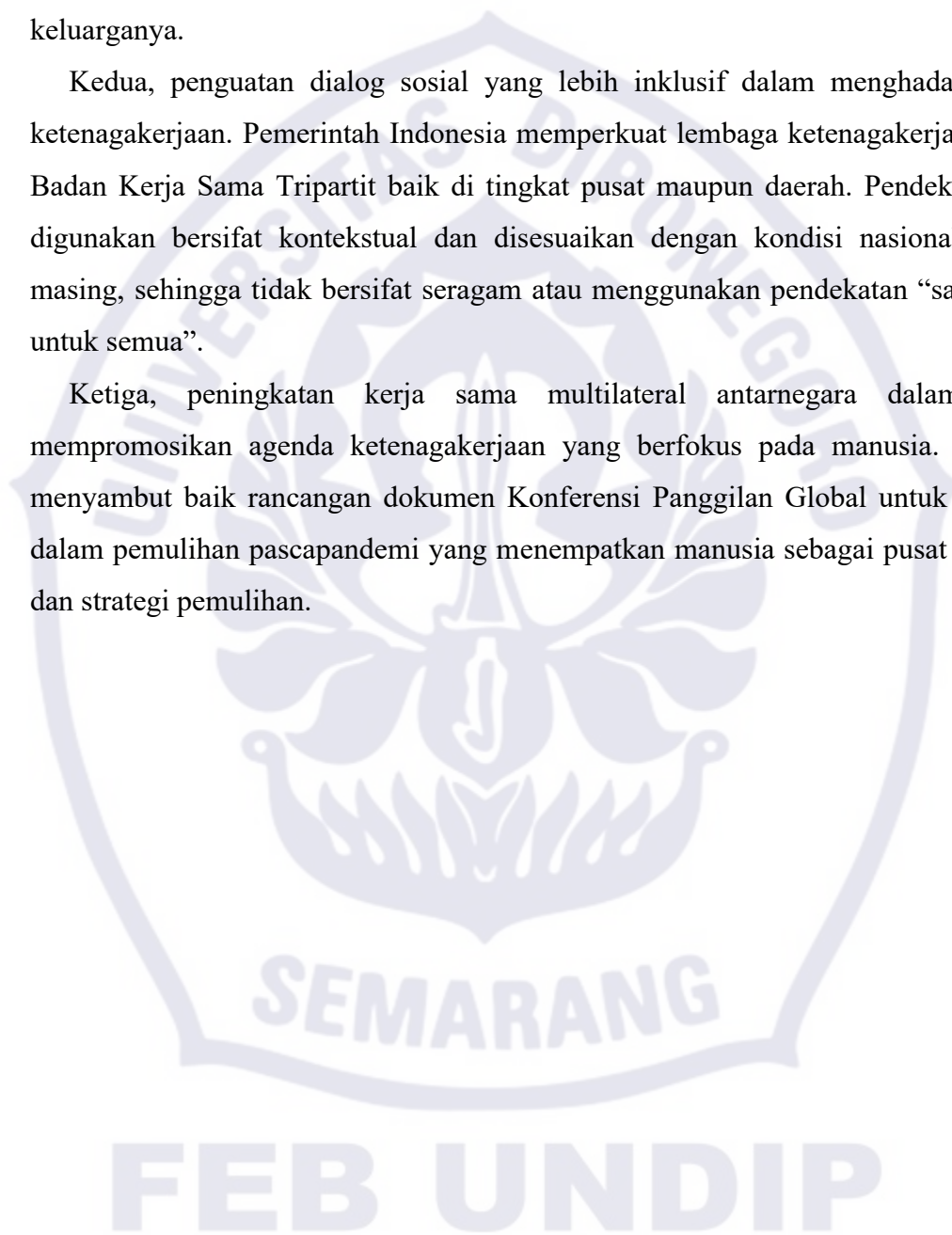
Dalam rangka merespons tantangan akibat pandemi, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan delapan kebijakan utama yang meliputi pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku usaha serta program bantuan sosial bagi pekerja terdampak. Program ini mencakup dukungan bagi sekitar 56 juta pekerja formal dan pemberian jaminan sosial kepada lebih dari 70 juta pekerja informal. Di samping itu, pemerintah juga telah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan memperluas penciptaan lapangan kerja.

Dalam menavigasi masa depan dunia kerja global, pemerintah mengidentifikasi tiga pilar kebijakan utama. Pertama, investasi pada bidang pekerjaan yang layak dan berkelanjutan melalui penerapan konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang melibatkan partisipasi sektor swasta untuk menutup kesenjangan keterampilan. Pemerintah juga melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam revitalisasi lembaga pelatihan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan

kebutuhan industri. Selain itu, penguatan ekonomi perdesaan dilakukan melalui alokasi dana desa serta program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mantan pekerja migran serta keluarganya.

Kedua, penguatan dialog sosial yang lebih inklusif dalam menghadapi isu-isu ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia memperkuat lembaga ketenagakerjaan seperti Badan Kerja Sama Tripartit baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi nasional masing-masing, sehingga tidak bersifat seragam atau menggunakan pendekatan “satu ukuran untuk semua”.

Ketiga, peningkatan kerja sama multilateral antarnegara dalam rangka mempromosikan agenda ketenagakerjaan yang berfokus pada manusia. Indonesia menyambut baik rancangan dokumen Konferensi Panggilan Global untuk bertindak dalam pemulihan pascapandemi yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan dan strategi pemulihan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk telah lolos uji asumsi klasik diantaranya yaitu uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Secara parsial, tingkat partisipasi tenaga kerja wanita dan pendidikan wanita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara simultan bahwa Pendidikan perempuan dan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Uji T yang dilakukan, tingkat partisipasi tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat Pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan jurnal yang berjudul “*Impact of female education on poverty reduction: an evidence from Pakistan*” yang ditulis oleh Prof. Dr. Abdul Ghafoor Awan & Aasma Malik. 2020 yang mana Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara pendidikan perempuan dan kemiskinan, yang berarti peningkatan pendidikan perempuan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung temuan yang ada di jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah Wanita yang Bekerja terhadap Kemiskinan di Jawa Timur” yang ditulis oleh Putrizahrah, Anisah, 2019 yang menyatakan bahwa kesehatan, pendidikan, dan jumlah wanita yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk interpretasi hasil dan arah penelitian selanjutnya:

1. Penelitian hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan, sehingga belum mencakup faktor lain yang juga memengaruhi kemiskinan seperti kesehatan, struktur rumah tangga, atau akses terhadap pekerjaan formal.
2. Data yang digunakan bersifat kuantitatif sekunder sehingga tidak dapat menangkap faktor sosial dan budaya yang mungkin memengaruhi partisipasi kerja dan kondisi kemiskinan perempuan.
3. Analisis dilakukan secara agregat tanpa membedakan wilayah, sehingga tidak dapat menggambarkan perbedaan kondisi antar daerah (misalnya antara desa dan kota atau antar provinsi).
4. Tidak adanya pengukuran kualitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, yang dapat memengaruhi signifikansi pengaruh partisipasi tenaga kerja terhadap kemiskinan.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan oleh penulis untuk pemerintah yaitu diharapkan pemerintah daerah setempat dapat mengupayakan penyediaan lapangan kerja yang pro perempuan untuk menampung angkatan kerja perempuan yang menurut hasil penelitian ini, merupakan variabel dominan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, tingkat pendidikan juga perlu

mendapatkan perhatian khusus, baik pendidikan formal maupun non formal.

Peningkatan pendidikan baik formal maupun informal untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang tinggi serta dapat mengurangi angka kemiskinan perlu merubah mindset pikiran setiap perempuan bahwa pendidikan lebih mampu mengubah kehidupan agar jadi lebih baik. Pemerintah perlu sering-seringnya melaksanakan kegiatan sosialisasi peran dan fungsi pendidikan sejak dini. Dengan berkompetisi dalam merebutkan pekerjaan yang sangat amat bersaing ketat dan cermat dalam memperoleh pekerjaan yang layak, perempuan semestinya sadar penuh akan pentingnya pendidikan sehingga perlu adanya sosialisasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk pemerintah perlu mendukung dan menyokong perbaikan fasilitas pendidikan, dengan memperluas dan menambahkan serta menumbuhkan akses ke masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi melewati beberapa program beasiswa bagi perempuan yang berprestasi dan bidik misi bagi perempuan yang kurang mampu. Perusahaan atau para pencipta lapangan kerja pasti membutuhkan para pekerja yang memiliki keahlian yang berhubungan era digital modern. Sehingga pemerintah perlu menciptakan pelatihan kerja yang sesuai dengan perubahan teknologi bagi perempuan. Perempuan juga perlu menanamkan jiwa kewirausahaan agar dapat membuka lapangan sendiri dan tidak bergantung pada kesempatan kerja yang ada. Pemerintah perlu memberikan pinjaman dana untuk para pelaku usaha UMKM dan pelatihan tentang kewirausahaan khususnya untuk perempuan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran

dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak terkait:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti status pernikahan, usia pernikahan, beban tanggungan, akses layanan kesehatan, dan kualitas pekerjaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kemiskinan.
2. Pendekatan metode campuran (mixed methods) sangat dianjurkan, agar dapat menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menangkap aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih kompleks, termasuk faktor patriarki, diskriminasi gender, dan beban ganda yang dialami perempuan.
3. Disarankan menggunakan data panel atau time series antar wilayah untuk melihat dinamika pengaruh variabel dari waktu ke waktu dan perbedaan karakteristik antar daerah.
4. Segmentasi wilayah perkotaan dan pedesaan perlu diperhatikan, karena perbedaan kondisi ekonomi dan budaya dapat memengaruhi partisipasi perempuan dan tingkat kemiskinan secara berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesi, D. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pendapatan Perempuan pada Keluarga Miskin di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(10), 44678.
- Arsyad, L. 2010, *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Astuti, E. W. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Semarang). *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 162-185.
- Awan, A. G., & Malik, A. 2020. *Impact of female education on poverty reduction: An Evidence from Pakistan*. *Global Journal of Management, Social Sciences and Humanities*, 6.
- Bastos, Amalia, Sara F. Casaca, Fransisco Nunes, and Jose Pereirinha. 2009. *Women and Poverty: A Gender-Sensitive Approach*. *The Journal of Socio-Economics*, 38, 764-778.
- Betti, G., Mangiavacchi, L., & Piccoli, L. 2020. *Women and poverty: insights from individual consumption in Albania*. *Review of Economics of the Household*, 18(1), 69-91.
- Bloom, David; Canning, David and Chan, Kevin. 2006. *Higher Education and Economic Development in Africa*. *Human Development Research*, Vol. 5, No. 1, (PP: 25-90).
- Ferezagia, D. V. 2018. Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Giovanni, R. 2018. Analisis pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23-31.
- Handayani, A. 2018. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002-2015. *Jurnal Ekbis*, 19(1), 1024-1037.
- Hardinandar, F. 2019. Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1-12.

- Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Indraswari. "Perempuan dan Kemiskinan." Jurnal Analisis Sosial, Sep. 2009, pp. 40-52.
- Juhaidi, A., & Umar, M. 2020. Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia, Masihkah Berkorelasi?. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 18(1), 1-24.
- Kurniawan, R. A. 2018. Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya tahun 2007-2016. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 6(2).
- Maghfirah, H., & Zulham, T. 2016. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja Wanita di Aceh. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 3(2), 65-77.
- Pratomo, D. S. 2017. Pendidikan dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-U. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 10(2), 14-22.
- Pregiwati, R. P. 2018. Analisis Pengaruh Tingkat Pernikahan Usia Dini, Tingkat Fertilitas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Airlangga).
- Putrizahrah, Anisah. 2019. Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah Wanita yang Bekerja Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 7(2).
- Rizal, R. N. 2015. Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia?. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 16(1), 15-30.
- Sudarmini, Ni Nyoman. 2006. Peranan Pekerja Perempuan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Pada Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Gianyar, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi. Tesis tidak diterbitkan. Denpasar: PPS Universitas Udayana.
- Sugiyono 2015. Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sumarsono, S. 2009. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tamba, W., Rizka, M. A., & Andriani, I. (2020). Implementasi Pendidikan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Perempuan Berbasis *Life Skill Education*. Jurnal Paedagogy, 7(3), 237-243.
- Todaro, Michael P. 1994. Ekonomi Untuk Negara Berkembang. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, Nenny, dan Verry Yarda Ningsih. (2020). *Peran Wanita Tani Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas*. Jurnal Agribis, 13(2).
- Widyasworo, R. 2014. Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Angkatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus tahun 2008-2012) (*Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya)

LAMPIRAN

1. Data Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan

Tahun	Total Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan (%)
2010	46,8
2011	52,44
2012	51,39
2013	50,28
2014	50,22
2015	48,87
2016	50,77
2017	50,89
2018	51,88
2019	51,81
2020	53,13

2. Data Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Indonesia (%)
2010	6,89
2011	6,96
2012	7,03
2013	7,09
2014	7,23
2015	7,35
2016	7,50
2017	7,65

2018	7,72
2019	7,89
2020	8,07

3. Data Kemiskinan di Indonesia

Tahun	Angka Kemiskinan Di Indonesia (%)
2010	10,10
2011	9,74
2012	9,34
2013	9,28
2014	9,00
2015	9,29
2016	9,10
2017	9,02
2018	8,41
2019	8,15
2020	8,58

4. Uji T

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Least Squares

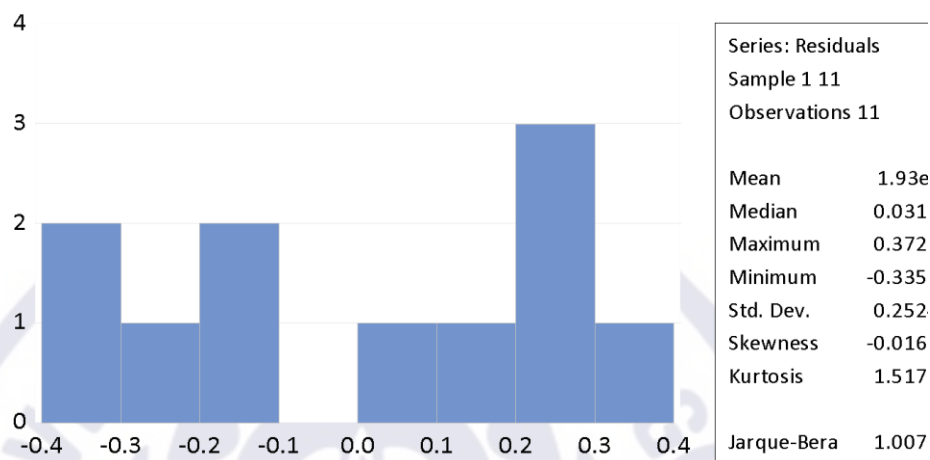
Date: 10/28/21 Time: 20:07

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.30693	2.591437	7.836164	0.0001
TPAK	-0.059399	0.060901	-0.975339	0.3580
PENDIDIKAN	-1.108291	0.269526	-4.111998	0.0034
R-squared	0.800820	Mean dependent var	9.091818	
Adjusted R-squared	0.751025	S.D. dependent var	0.565718	
S.E. of regression	0.282279	Akaike info criterion	0.535156	
Sum squared resid	0.637450	Schwarz criterion	0.643673	
Log likelihood	0.056641	Hannan-Quinn criter.	0.466751	
F-statistic	16.08230	Durbin-Watson stat	1.625528	
Prob(F-statistic)	0.001574			

5. Uji Normalitas



6. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 10/28/21 Time: 20:11
Sample: 1 11
Included observations: 11

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.715547	927.0822	NA
TPAK	0.003709	1321.281	1.442258
PENDIDIKAN	0.072644	550.3369	1.442258

7. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.759790	Prob. F(2,6)	0.2504
Obs*R-squared	4.066921	Prob. Chi-Square(2)	0.1309

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 10/28/21 Time: 20:13
Sample: 1 11
Included observations: 11
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.038830	2.382148	0.016300	0.9875
TPAK	0.006856	0.062783	0.109198	0.9166
PENDIDIKAN	-0.051425	0.303366	-0.169514	0.8710
RESID(-1)	0.275542	0.465196	0.592314	0.5753
RESID(-2)	-0.839104	0.449574	-1.866444	0.1112
R-squared	0.369720	Mean dependent var	1.93E-15	
Adjusted R-squared	-0.050467	S.D. dependent var	0.252478	
S.E. of regression	0.258770	Akaike info criterion	0.437201	
Sum squared resid	0.401772	Schwarz criterion	0.618063	
Log likelihood	2.595393	Hannan-Quinn criter.	0.323193	
F-statistic	0.879895	Durbin-Watson stat	2.034079	
Prob(F-statistic)	0.528092			

8. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.838756	Prob. F(5,5)	0.2600
Obs*R-squared	7.125063	Prob. Chi-Square(5)	0.2115
Scaled explained SS	0.975435	Prob. Chi-Square(5)	0.9645

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/28/21 Time: 20:16
Sample: 1 11
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.993453	10.65772	0.843844	0.4373
TPAK^2	-0.002206	0.007957	-0.277255	0.7927
TPAK*PENDIDIKAN	0.017942	0.052204	0.343695	0.7451
TPAK	0.098361	0.829922	0.118518	0.9103
PENDIDIKAN^2	0.152751	0.312590	0.488662	0.6458
PENDIDIKAN	-3.158119	3.473123	-0.909302	0.4049
R-squared	0.647733	Mean dependent var	0.057950	
Adjusted R-squared	0.295466	S.D. dependent var	0.043729	
S.E. of regression	0.036705	Akaike info criterion	-3.469367	
Sum squared resid	0.006736	Schwarz criterion	-3.252333	
Log likelihood	25.08152	Hannan-Quinn criter.	-3.606176	
F-statistic	1.838756	Durbin-Watson stat	2.424681	
Prob(F-statistic)	0.260003			